

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI PROGRAM INDONESIA PINTAR PADA JENJANG  
SEKOLAH MENENGAH ATAS DI SMA NEGERI 17 BONE  
KECAMATAN LAMURU KABUPATEN BONE**



Nomor Induk Mahasiswa: 10561 11205 16

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2021

**SKRIPSI**

**IMPLEMENTASI PROGRAM INDONESIA PINTAR PADA JENJANG  
SEKOLAH MENENGAH ATAS DI SMA NEGERI 17 BONE  
KECAMATAN LAMURU KABUPATEN BONE**

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Studi dan Memperoleh  
Gelar Sarjana Ilmu Administrasi Negara

Disusun dan Diajukan Oleh :

**NUR AZIZAH**

Nomor Stambuk : 10561 11205 16

Kepada

15/03/2021

1 cap  
Smb Alumni

R/0023/ADIN/21  
AZI

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA<sup>i</sup>**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

**2021**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

Judul Skripsi : Implementasi Program Indonesia Pintar pada  
Jenjang Sekolah Menengah Atas di SMANegeri  
17 Bone Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone

Nama Mahasiswa : Nur Azizah

Nomor Stambuk : 10561 11205 16

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyetujui :

Pembimbing I

Pembimbing II

  
Dr. Abdul Mahsyar, M.Si

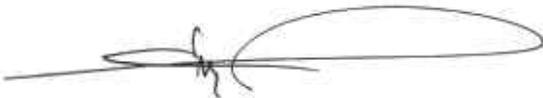
  
Dr. Haerana, S.Sos., M.Pd

Mengetahui

Dekan

Ketua Program Studi

  
Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si  
NBM: 730727

  
Nasrulhaq, S.Sos., MPA  
NBM: 1067463

## HALAMAN PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh Tim Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor 0157/FSP/A.4-II/II/42/2021 sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sarjana dalam Program Studi Ilmu Administrasi Negara yang dilaksanakan di Makassar pada hari Rabu tanggal 24 bulan Februari tahun 2021.



### TIM PENILAI

Ketua

Sekretaris

  
**Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si**  
NBM: 730727

  
**Dr. Burhanuddin, S.Sos., M.Si**  
NBM: 1084366

### PENGUJI:

1. Dr. Abdul Mahsyar, M.Si
2. Adnan Ma'ruf, S.Sos., M.Si
3. Dr. Hafiz Elfiansyah Parau, M.Si
4. Nurbiah Tahir, S.Sos., M.Ap

 )  
(  )  
(  )  
(  )

## HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Azizah

Nomor Stambuk : 10561 11205 16

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyatakan bahwa benar proposal penelitian ini adalah karya saya sendiri dan bukan hasil plagiat dari sumber lain. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, Maret 2020

Yang Menyatakan



Nur Azizah  
NIM.105611123316

## ABSTRAK

### **NUR AZIZAH.2020 Implementasi Program Indonesia Pintar Pada Jenjang Sekolah Menengah Atas Di SMA Negeri 17 Bone Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone (dibimbing oleh Abdul Mahsyar dan Haerana)**

implementasi merupakan suatu proses pelaksanaan kebijakan yang dilaksanakan oleh para implementor untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pendidikan merupakan aspek yang sangat penting dalam kehidupan, Pendidikan yang diyakini memiliki kontribusi cukup besar terhadap pengembangan sumber daya manusia. dengan mendapatkan pendidikan yang layak dan baik seseorang dapat menjadi lebih berarti baik untuk diri sendiri maupun lingkungan sekitarnya.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Implementasi Kebijakan Program Indonesia Pintar Pada Jenjang Sekolah Menengah Atas Di Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone. Jenis penelitian yang digunakan kualitatif dengan tipe penelitian yaitu studi kasus. Informan pada penelitian ini sebanyak 5 orang sebagai informan kunci. Data-data penelitian diperoleh dari berbagai sumber data yaitu data primer dan sekunder. Pengumpulan data di lakukan melalui wawancara, dokumentasi dan observasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarik kesimpulan. Teknik pengabsahan data yang di gunakan adalah triangulasi sumber, teknik dan waktu.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Program Indonesia Pintar Pada Jenjang Sekolah Menengah Atas Di SMA Negeri 17 Bone Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone sudah optimal. Berdasarkan beberapa indicator implementasi dalam penelitian ini yaitu : 1) standar dan sasaran kebijakan, sangat membantu siswa kurang mampu dalam pendidikan, 2) sumber daya, sumber daya manusia baik sarana dan prasana sudah baik, 3) komunikasi antar organisasi dan penguat aktivitas, komunikasi antar para pelaksana sudah baik dalam mendorong berhasilnya kebijakan PIP, 4) Karakteristik agen pelaksana, SOP yang ada sudah cocok dengan kebijaksanaan ini, 5) disposisi implementor, melaksanakan implementasi kebijakan dengan baik karena memahami SOP yang ada, 6) lingkungan sosial ekonomi dan politik, kebijakan PIP ini mendapat dukungan dari orang tua dan pihak sekolah.

**Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Program Indonesia Pintar**

## KATA PENGANTAR

*“Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh”*

Segala puji syukur, penulis hatur dan panjatkan untuk kehadiran Allah SWT, sangpencipta yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Implementasi Kebijakan Program Indonesia Pintar Pada Jenjang Sekolah Menengah Atas Di SMA Negeri 17 Bone Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone”

Berbagai pihak yang telah memberikan semangat, dukungan dan bantuan kepada penulis dalam pembuatan skripsi ini, maka dari itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terimakasih kepada:

1. Kedua Orang Tua dan segenap Keluarga Besar Tercinta yang senantiasa memberikan semangat dan spirit bantuan baik bentuk moril maupun materil.
2. Kepada Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar beserta jajarannya.
3. Ibu Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar beserta jajarannya.
4. Bapak Nasrulhaq, S.Sos., MPA selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara dan Ibu Nurbiah Tahir, S.Sos., M.AP selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar beserta jajarannya.
5. Bapak selaku Dr. Abdul Mahsyar, M.Si. Pembimbing I dan Ibu Haerana, S.Sos., M.Pd. selaku Pembimbing II yang tak kenal lelah telah memberikan

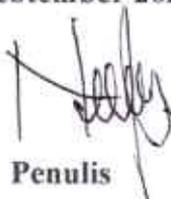
bimbingan, mengarahkan, mengkoreksi, serta selalu mendorong dan membantu untuk memberi semangat penulis hingga penyelesaian skripsi ini.\

6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen baik Pengajar atau Asistennya, seluruh Staff Pegawai di ruang lingkup Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
7. Seluruh tenaga pendidik di SMA Negeri 17 Bone, dan seluruh Informan yang telah membantu dan memberikan arahan kepada penulis dalam melaksanakan penelitian.
8. Serta teman-temanku Tinyong, Eliza, Dara, Anni dan Rosita yang selalu setia menemani, memberikan semangat dan dukungannya.
9. Saudara-seperjuangan Angkatan Ilmu Administrasi Negara Federasi 2016 Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Makassar sebagai rekan-rekan seperjuangan dalam memperjuangkan Toga.
10. Serta yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah memberikan doa dan dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Akhirnya skripsi ini telah selesai, semoga berguna dan bermanfaat kepada semua baik penulis maupun orang lain Inya Allah SWT. Semoga mendapat lindungan dan berkah dan karunia dari tuhan Allah SWT kepada Bapak, Ibu serta Saudara (i) atas segala bantuannya, Aamiin Ya Rabbal Alamin.

*Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

**Makassar, 17 September 2020**



**Penulis**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENERIMAAN TIM.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN.....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>8</b>
A. Penelitian Terdahulu.....	8
B. Konsep dan Teori.....	11
C. Kerangka Pikir.....	24
D. Fokus Penelitian.....	25
E. Deskripsi Fokus Penelitian.....	25
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>27</b>
A. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	27
B. Jenis dan Tipe Penelitian.....	27
C. Sumber Data.....	28
D. Informan Penelitian.....	28
E. Teknik Pengumpulan Data.....	29
F. Teknik Analisis Data.....	30
G. Pengabsahan Data.....	31

<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>37</b>
A. Deskripsi Lokasi Penelitian .....	37
B. Hasil Penelitian .....	44
C. Pembahasan .....	63
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>37</b>
A. Penutup .....	70
B. Saran .....	71
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>64</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>66</b>



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan menurut Edwards III .....	15
Gambar 2.2 Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Menurut Van Meter Dan Van Horn .....	18
Gambar 2.3 Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Menurut Mazmanian dan Sabatier.....	20
Bagan 2.4 Kerangka Pikir.....	28
Gambar 4.1. Peta Kabupaten Bone.....	37
Gambar 4.2. Peta Kecamatan Lamuru.....	40



## DAFTAR TABEL

Tabel 4.1. daftar siswa penerima PIP SMAN 17 BONE .....	35
Tabel 4.2. Sarana dan Prasarana Pendukung SMAN 17 BONE.....	35



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pendidikan merupakan aspek yang sangat penting dalam kehidupan, Pendidikan yang diyakini memiliki kontribusi cukup besar terhadap pengembangan sumber daya manusia. dengan mendapatkan pendidikan yang layak dan baik seseorang dapat menjadi lebih berarti baik untuk diri sendiri maupun lingkungan sekitarnya.

Pendidikan juga merupakan sarana untuk mengurangi kemiskinan, setiap warga negara Indonesia mempunyai hak yang sama yaitu mendapatkan pelayanan pendidikan, oleh karena itu pemerintah mengeluarkan kebijakan program Indonesia Pintar (PIP) yang bertujuan untuk memberikan pelayanan pendidikan sampai tamat satuan pendidikan menengah dan mencegah peserta didik putus sekolah, sehingga diperlukan implementasi yang baik dalam mencapai tujuan tersebut.

Program Indonesia Pintar merupakan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan mengurangi angka putus sekolah bagi siswa kurang mampu dalam bentuk pemberian dana bantuan. Program Indonesia Pintar adalah salah satu dari program perlindungan sosial yang dibuat oleh pemerintah melalui ditetapkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, dalam Pasal 2 ayat (2) menjelaskan mengenai

program perlindungan sosial untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan yang meliputi; Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat. Program Indonesia Pintar sebagai upaya pemerintah untuk mendukung dari pelaksanaan pendidikan nasional, dimana hal tersebut termuat dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar.

Patton dan Sawicki bahwa implementasi berkaitan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan untuk merelisasikan program, dimana posisi ini eksekutif mengatur cara untuk mengorganisir, menginterpretasikan, dan menerapkan kebijakan yang telah diseleksi (Tangkilisan 2003 : 9). Van Meter dan Van Horn membatasi implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya (Solichin 2007 : 146).

Berdasarkan pendapat Patton, Sawicki dan Van Meter, Van Horn bahwa implementasi sangat diperlukan dalam mengorganisir dan menerapkan suatu kebijakan agar tujuan dari kebijakan tersebut dapat tercapai. Hasil penelitian Winda Yanti (2018) terkait Implementasi Pendistribusian Kartu Indonesia Pintar (KIP) Di Kelurahan Labuhan Deli Kecamatan Medan Marelan, juga menyimpulkan bahwa pendistribusian kartu Indonesia Pintar yang merupakan produk dari program Indonesia Pintar diperlukan implementasi yang baik untuk mencapai sasaran atau tujuan yang diinginkan.

Semua warga negara Indonesia berhak mendapatkan pendidikan, namun belum semua warga negara Indonesia mampu mengakses pendidikan sehingga tujuan pemerintah dalam penyelenggaraan wajib belajar belum sepenuhnya tercapai. Faktor yang kurang mendukung pendidikan salah satunya adalah masalah kemiskinan yang menjauhkan masyarakat dalam menjangkau pendidikan. Oleh karena itu pemerintah mengeluarkan kebijakan yaitu program Indonesia Pintar sebagai alternatif untuk meminimalisir tingkat drop out atau putus sekolah akibat kemiskinan.

Program Indonesia Pintar ini merupakan penyempurnaan Program Bantuan Siswa Miskin (BSM), Program Indonesia Pintar (PIP) merupakan program prioritas Presiden Joko Widodo yang dirancang khusus untuk membantu anak dari keluarga miskin/tidak mampu agar tetap mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat pendidikan menengah/ sederajat dan telah di realisasikan disetiap sekolah-sekolah di Indonesia, sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2014 mengamanatkan agar Kartu Indonesia Pintar (KIP) diberikan kepada anak-anak yang berusia 6 sampai dengan 21 tahun dari keluarga pemegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), sebagai identitas untuk mendapatkan manfaat PIP. Bantuan pendidikan yang diberikan pemerintah kepada pemegang KIP di tingkat Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah/Paket A sebesar Rp225.000,-/semester (Rp450.000,-/tahun), tingkat Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah/Paket B sebesar Rp375.000,-/semester (Rp750.000,-/tahun), dan tingkat Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah/Paket C sebesar Rp500.000,-/semester (Rp1.000.000,-/tahun), serta Rp1.000.000,- untuk Peserta

Kursus selama mengikuti kursus terstandar dalam satu periode kursus dalam satu tahun.

Hasil penelitian saras setiyawati (2018) juga menemukan bahwa masih terdapat siswa yang berasal dari keluarga mampu terdaftar sebagai penerima dana KIP serta masih adanya siswa yang tergolong tidak mampu tidak terdaftar sebagai penerima dana KIP.

Terkait dengan implementasi program PIP, SMA Negeri 17 Bone di kecamatan lamuru kabupaten bone menjadi salah satu kecamatan dengan tingkat siswa yang menerima PIP cukup banyak, di sekolah kebutuhan akademik maupun non akademiknya diperlukan biaya yang cukup besar oleh karena itu KIP yang merupakan produk dari PIP sangat di butuhkan siswa/siswi untuk mengurangi beban dari orang tua.

Hasil observasi awal peneliti menemukan bahwa implementasi PIP masih belum begitu baik, dikarenakan masih ditemukan beberapa siswa/siswi Yang tergolong keluarga mampu menerima kebijakan ini, sehingga banyak dari siswa/siswi yang kurang mampu mengalami kesusahan dalam administrasi sekolah. Beberapa orang tua juga mengaku kurangnya informasi dari pemerintah soal kebijakan PIP ini, pendataan yang masih perlu untuk ditingkatkan. Pendataan yang kurang baik sehingga menyebabkan pengimplementasian PIP di sekolah-sekolah yang ada di Bone terutama pada jenjang sekolah menengah atas juga pernah diliput dalam salah satu media cetak/ online, dimana Tidak validnya data kependudukan kembali terbukti pada Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang

diluncurkan Pemerintah Pusat di Kabupaten Bone. Kartu yang seharusnya diperuntukkan kepada para siswa dari keluarga tidak mampu untuk mendapatkan bantuan biaya sekolah justru didapatkan oleh orang yang tidak berhak. (watampone, bone satu).

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini, adalah:

1. Siapa sasaran kebijakan pada Implementasi Program Indonesia Pintar Pada jenjang Sekolah Menengah Atas Di SMA Negeri 17 Bone Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone ?
2. Bagaimana sumber daya pada Implementasi Program Indonesia Pintar Pada jenjang Sekolah Menengah Atas Di SMA Negeri 17 Bone Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone ?
3. Bagaimana komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas pada Implementasi Program Indonesia Pintar Pada jenjang Sekolah Menengah Atas Di SMA Negeri 17 Bone Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone ?
4. Bagaimana karakteristik agen pelaksana pada Implementasi Program Indonesia Pintar Pada jenjang Sekolah Menengah Atas Di SMA Negeri 17 Bone Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone ?
5. Bagaimana kondisi social ekonomi dan politik pada Implementasi Program Indonesia Pintar Pada jenjang Sekolah Menengah Atas Di SMA Negeri 17 Bone Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone ?

6. Bagaimana disposisi implementor pada Implementasi Kebijakan Program Indonesia Pintar Pada jenjang Sekolah Menengah Atas Di SMA Negeri 17 Bone Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone ?

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan penelitian ini, adalah:

1. Untuk mengetahui sasaran dan tujuan pada Implementasi Program Indonesia Pintar Pada Jenjang Sekolah Menengah Atas Di SMA Negeri 17 Bone Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone.
2. Untuk mengetahui sumber daya pada Implementasi Kebijakan Program Indonesia Pintar Pada Jenjang Sekolah Menengah Atas Di SMA Negeri 17 Bone Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone.
3. Untuk mengetahui komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas pada Implementasi Kebijakan Program Indonesia Pintar Pada Jenjang Sekolah Menengah Atas Di SMA Negeri 17 Bone Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone.
4. Untuk mengetahui karakteristik agen pelaksana pada Implementasi Kebijakan Program Indonesia Pintar Pada Jenjang Sekolah Menengah Atas Di SMA Negeri 17 Bone Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone.
5. Untuk mengetahui kondisi social pada Implementasi Kebijakan Program Indonesia Pintar Pada Jenjang Sekolah Menengah Atas Di SMA Negeri 17 Bone Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone.

6. Untuk mengetahui disposisi implementor pada Implementasi Kebijakan Program Indonesia Pintar Pada Jenjang Sekolah Menengah Atas Di SMA Negeri 17 Bone Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dikemukakan, maka manfaat penelitian ini, adalah:

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan wawasan dalam dunia pendidikan mengenai implementasi Program Indonesia Pintar.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Sekolah Menengah Atas di Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone dan memberikan wawasan pemikiran dalam pengembangan layanan pelaksanaan tugas kepada yang membutuhkan.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Untuk mendukung penelitian ini maka pada bagian ini penulis menyajikan beberapa hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan Implementasi Kebijakan Tentang Retribusi Perizinan tertentu dalam Penataan Pasar Tradisional Kabupaten Pangkep. Adapun penelitian terdahulu terkait penelitian ini yaitu:

Pertama adalah penelitian yang dilakukan oleh Sugiyasari (2017) dengan judul “Implementasi Program Indonesia Pintar Melalui Kartu Indonesia Pintar Tahun 2015/2016 Di Sma N 11 Yogyakarta”. Metode penelitian menggunakan kualitatif. Hasil dari penelitian ini yaitu Implementasi PIP melalui KIP di SMA N 11 Yogyakarta dapat dilihat dari empat aspek yaitu komunikasi kebijakan, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi.

##### a. Aspek Komunikasi

Kebijakan Komunikasi kebijakan adalah proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan. Sebelum dikomunikasikan ke sekolah biasanya akan diadakan rapat koordinasi antara pemerintah pusat dengan dinas provinsi.

##### b. Aspek Sumber Daya

Di SMA N 11 Yogyakarta yang menjadi pengelola PIP adalah guru BK dibantu oleh admin sekolah dan bendahara. Jumlah guru BK di SMA N 11 Yogyakarta adalah 2 orang, bendahara sekolah 1 orang, dan admin sekolah 1 orang. Jumlah pengelola di sekolah sudah cukup.

c. Aspek Disposisi

Disposisi merupakan watak dan karakteristik yang dimiliki oleh pelaksana kebijakan (Subarsono, 2005:91). Dalam pelaksanaan PIP melalui KIP terdapat personil pelaksana yang proaktif terhadap program tersebut dan ada juga yang apatis.

d. Aspek Struktur Birokrasi

Dalam penelitian tentang implementasi PIP melalui PIP aspek birokrasi difokuskan pada peran sekolah dan dinas DIKPORA dalam melaksanakan PIP melalui KIP serta strategi yang dilakukan untuk melaksanakan PIP agar efektif dan efisien.

Penelitian kedua adalah penelitian yang dilakukan oleh Rini Septiani Astuti (2016) yang berjudul "Implementasi Kebijakan Kartu Indonesia Pintar Dalam Upaya Pemerataan Pendidikan Tahun Ajaran 2015/2016 Di Smp Negeri 1 Semin". Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa "Kartu Indonesia Pintar diberikan khususnya untuk siswa dari keluarga miskin atau sedang terkena bencana atau yatim piatu. Sehingga kehidupan mereka akan berkembang, lebih berbeda pada perkembangan pendidikannya dan kesejahteraan siswa karena yang tadinya tidak bisa jajan menjadi bisa jajan. dalam memanfaatkan dana KIP tersebut siswa menggunakannya untuk membeli buku, alat tulis, seragam sekolah, transportasi ke sekolah, uang saku dan biaya les tambahan siswa.

Penelitian ke tiga adalah penelitian yang dilakukan oleh Illiya Arina Riska, Dewi Rostyaningsih (2018) yang berjudul "Implementasi Program Indonesia Pintar Pada Jenjang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Di Smp 3 Satu Atap

Gebog Kudus". Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dilapangan sendiri pelaksana Program Indonesia Pintar dapat memahami dengan benar maksud dan tujuan Program Indonesia Pintar. Keberhasilan dapat terlihat dari terpenuhinya kebutuhan sekolah penerima Program Indonesia Pintar. Akan tetapi dilapangan juga terlihat beberapa permasalahan seperti :

- a. Sebagian kecil orangtua penerima PIP merasa belum terbantu. Faktor penyebabnya adalah lingkungan sosial, yaitu ketidakpahaman orangtua penerima Program Indonesia Pintar terhadap teknis pelaksanaan program ini.
- b. Hanya sebatas pemberian bantuan biaya tanpa memperhatikan aspek lain seperti kualitas siswa. Disamping memberikan bantuan biaya, faktor kurangnya sumber daya manusia dalam hal ini tenaga pendidik/guru juga perlu diperhatikan. Karena kualitas seorang siswa terbentuk dari kualitas pendidik / sumber daya manusia yang berkualitas pula. Disamping itu kualitas fasilitas pendidikan / sumber daya sarana dan prasarana yang tidak memadai juga mempengaruhi mutu pendidikan dan kualitas siswa.
- c. Angka kesempatan bagi penduduk untuk mengenyam pendidikan di tingkat jenjang pendidikan SMP masih rendah. Faktor penyebabnya bukan hanya karena alasan permasalahan ekonomi saja, akan tetapi juga lingkungan sosial terkait minat siswa untuk melanjutkan sekolah yang rendah.

## **B. Konsep dan Teori**

### **1. Implementasi**

Implementasi adalah salah satu tahap dalam proses kebijakan publik. Biasanya implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas. Implementasi merupakan suatu rangkaian aktifitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang telah ditentukan (Afan Gaffar dalam Nirwana, 2015).

Meter dan Horn dalam Suaib (2016) mendefinisikan implementasi kebijakan merupakan sebuah tindakan-tindakan yang dilakukan atau dilaksanakan oleh individu-individu (dan kelompok-kelompok) pemerintah dan swasta yang di arahkan pada pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

dalam buku Solihin Abdul Wahab (2008:65), mengatakan bahwa :  
“implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan suatu fokus perhatian implementasi kebijaksanaan yakni kejadiankejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan Negara yang mencakup baik usahausaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata bagi masyarakat atau kejadian-kejadian”.

Dari beberapa definisi para ahli, maka dapat di simpulkan bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu proses pelaksanaan kebijakan yang dilaksanakan oleh para implementor untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Dalam implementasi suatu program atau kebijakan terdapat beberapa model yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam mengukur tingkat keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Adapun model-model implementasi kebijakan dalam perkembangannya, antara lain yaitu:

a) **Model implementasi kebijakan menurut George C. Edward III**

Dimana model implementasi kebijakan ketiga yang berspektif top down yang dikembangkan oleh George C. Edward III yang menerapkan model implementasi kebijakan publiknya dengan Direct and Indirect Impact on Implementation. Menurut teori implementasi kebijakan Edward III dalam Agustino (2008), ada 4 empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu antara lain:

1. Komunikasi

Variable pertama yang memiliki pengaruh terkait keberhasilan suatu kebijakan menurut Edward III yakni komunikasi. Dimana komunikasi menurutnya lebih lanjut sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari Implementasi kebijakan.

2. Sumberdaya

Menurut Edward III sumberdaya merupakan suatu hal yang sangat penting dalam mengimplementasikan kebijakan. Indikator terkait sumberdaya terdiri dari beberapa elemen yaitu, (a) fasilitas, (b) wewenang, (c) informasi dan (d) staf.

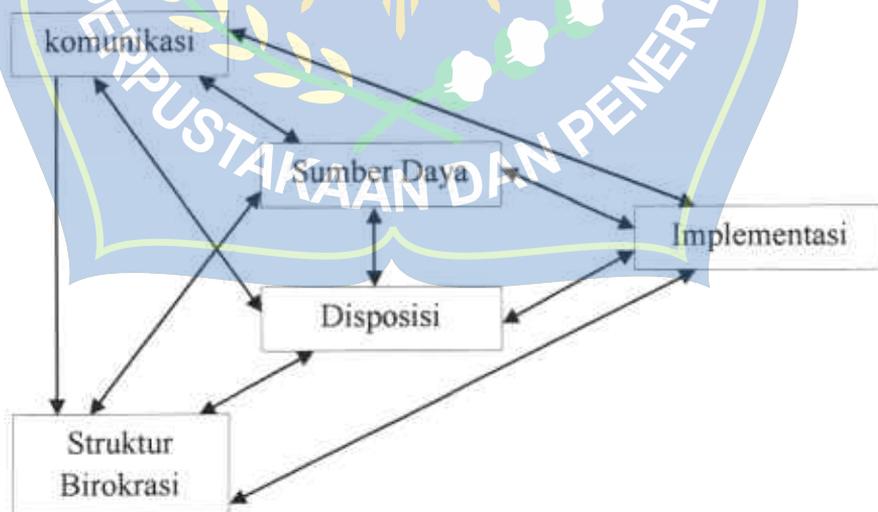
3. Disposisi

Disposisi merupakan sikap dari para pelaksana yang akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personil yang ada tidak melaksanakan kebijakan-kebijakan yang diinginkan oleh para pejabat tinggi.

#### 4. Struktur birokrasi

Dimana kebijakan ini sangat kompleks menuntut adanya kerja sama yang melibatkan banyak orang, ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia maka hal ini dapat membahayakan sumberdaya menjadi tidak efektif dan menghambat jalannya kebijakan.

Gambar 2.1. faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan menurut Edwards III



Sumber : Edward III dalam Agustino (2008)

#### b) Model implementasi kebijakan menurut Van Mater dan Van Horn

Model ini di sebut a model of the policy implementation process (model proses implementasi kebijakan). Argument yang diberikan

merupakan suatu perbedaan-perbedaan dalam proses pelaksanaan kebijakan akan di pengaruhi oleh sifat kebijakan. Pendekatan ini berusaha menggabungkan antara implementasi dengan isu kebijakan dan suatu model konseptual yang memperhatikan kebijakan dengan prestasi kerja. Kepatuhan, control dan perubahan bertindak adalah merupakan konsep yang penting dalam prosedur implementasi.

Implementasi kebijakan akan berhasil apabila perubahan yang di kehendaki relative sedikit, sementara kesepakatan terhadap tujuan terutama dari orang-orang yang mengoperasikan program di lapangan relatif tinggi (Suaib, 2016).

Van Meter dan Van Horn dalam Subarsono (2005:3) menjelaskan bahwa ada 6 variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, yaitu:

a. Standar dan sasaran kebijakan

Standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur, sehingga tidak menimbulkan interpretasi yang dapat menyebabkan terjadinya konflik diantara para agen implementasi.

b. Sumber daya

Kebijakan perlu didukung oleh sumber daya, baik itu sumber daya manusia maupun sumber daya non manusia.

c. Karakteristik agen pelaksana

Sejauh mana kelompok-kelompok kepentingan memberi dukungan bagi implementasi kebijakan. Termasuk didalamnya

karakteristik para partisipan yakni mendukung atau menolak, kemudian juga bagaimana sifat opini public yang ada dilingkungan dan apakah elite politik mendukung implementasi kebijakan.

d. Komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas

Dalam berbagai kasus, implementasi sebuah program terkadang perlu didukung dan dikoordinasikan dengan instansi lain agar tercapai keberhasilan yang di inginkan.

e. Sikap para pelaksana (disposisi implementor)

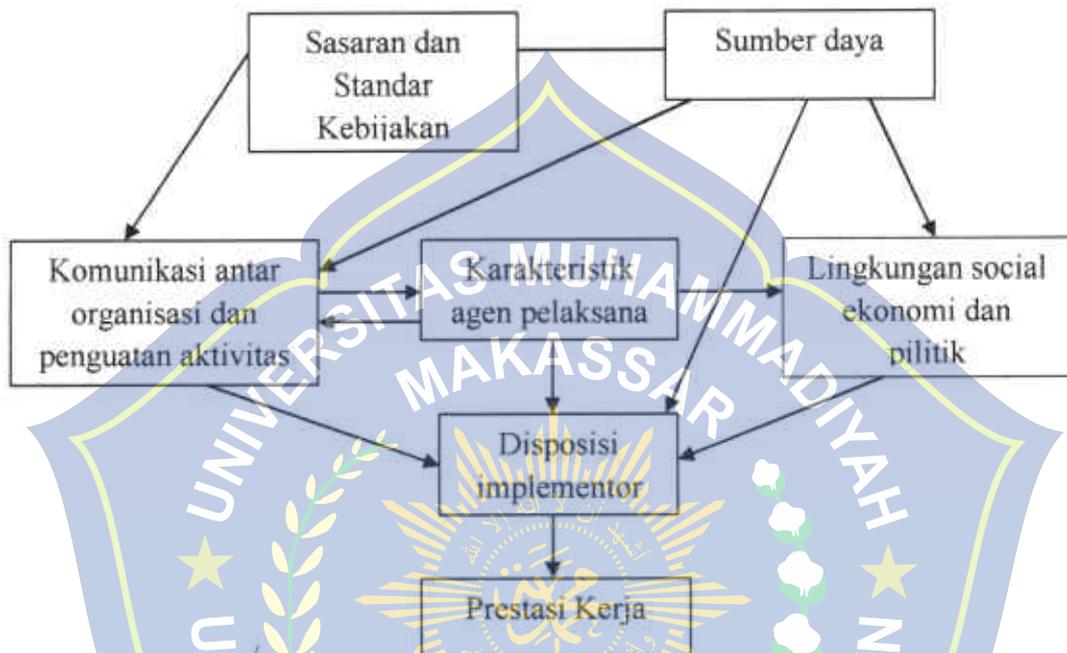
Disposisi implementor mencakup tiga hal penting, yaitu:

- 1) Respons implementor terhadap kebijakan, yang akan mempengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakan
- 2) Kognisi, yakni pemahamannya terhadap kebijakan
- 3) Intensitas disposisi implementor yakni prefensi nilai yang dimiliki oleh implementor

f. Kondisi sosial, ekonomi dan politik

Kondisi sosial, ekonomi dan politik mencakup sumber daya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan.

Gambar 2.2 Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Menurut Van Meter Dan Van Horn



Sumber : Subarsono (2005:3)

c) **Model implementasi kebijakan menurut Mazmanian dan Sabatier**

Menurut model Mazmanian dan Sabatier dalam (Nugroho, 2008:440), proses implementasi kebijakan dapat dibagi menjadi tiga variabel, yaitu:

- 1) Variabel intervening, adalah variabel kemampuan kebijakan untuk menstrukturkan proses implementasi dengan indicator konsistensi tujuan dan kejelasan, dipergunakannya teori kausal, ketetapan alokasi sumber dana, sikap dan risorsis konstituen, dukungan pejabat yang lebih tinggi, perekrutan pejabat pelaksana dan keterbukaan kepada pihak luar, keterpaduan hierarkis di diantara lembaga pelaksana, aturan pelaksana dari

lembaga pelaksana, dan variabel di luar kebijakan yang mempengaruhi proses implementasi yang berkenaan dengan indikator kondisi sosioekonomi dan teknologi, dukungan publik, serta komitmen dan kualitas kepemimpinan dari pejabat pelaksana.

- 2) Variabel independen, adalah mudah atau tidaknya masalah dikendalikan yang berkaitan dengan indikator masalah keragaman objek, teknis pelaksanaan, dan masalah teori, serta perubahan seperti apa yang dikehendaki.
- 3) ★ Variabel dependen, yaitu tahapan dalam proses implementasi dengan 5 tahapan pemahaman dari badan/lembaga pelaksana dalam bentuk disusunnya kebijakan pelaksana, penerimaan atas hasil nyata tersebut, hasil nyata, kepatuhan objek, dan akhirnya mengarah pada revisi atas kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan tersebut ataupun keseluruhan kebijakan yang bersifat mendasar.

Gambar 2.3 Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Menurut Mazmanian dan Sabatier



Sumber : Nugroho, 2008:440

Berdasarkan pemaparan model-model implementasi tersebut, maka model implementasi kebijakan yang akan digunakan peneliti merupakan model implementasi kebijakan menurut S. Van Meter dan Carl E. Van Horn dikarenakan variable yang dikembangkan Meter dan Horn merupakan variabel penting yang sangat mempengaruhi implementasi kebijakan dimana secara umum sudah mencakup dan sudah mewakili pendapat dari ahli lain. Dengan variabel-variabel tersebut peneliti lebih focus kepada indikator-indikator yang dikaji sehingga dapat membantu peneliti untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Program Indonesia Pintar di Jenjang Sekolah Menengah Atas di Kecamatan Lamuru, Kabupaten Bone.

## **2. Program Indonesia Pintar**

Pendidikan adalah suatu kegiatan yang melekat kepada setiap kehidupan bersama atau dalam bahasa politik disebut sebagai "Negara Bangsa", dalam rangka menjadikan kehidupan bersama tersebut mempunyai kemampuan untuk beradaptasi dan mengantisipasi perkembangan kehidupan.

Tujuan pendidikan disesuaikan dengan dimensi-dimensi kehidupan manusia. Setiap dimensi kehidupan (pembangunan) memiliki tujuan masing-masing dan semua dimensi itu motor penggeraknya adalah manusia yang memilih, menentukan, melaksanakan pilihannya guna untuk mencapai tujuan hidup, baik tujuan manusia secara umum maupun tujuan hidup manusia secara spesifik..

Demi meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, Pemerintah menelurkan berbagai program agar proses belajar mengajar dapat berjalan lebih efektif, salah satunya adalah Program Indonesia Pintar. Program Indonesia Pintar

(PIP) adalah bantuan berupa uang tunai yang diberikan oleh Pemerintah kepada peserta didik yang berasal dari keluarga kurang mampu yang mengalami kesulitan untuk membayar biaya pendidikan. Seperti yang tertuang pada Permendikbud 10 Tahun 2020 Tentang Program Indonesia Pintar, dana PIP dapat digunakan oleh peserta didik untuk memenuhi segala kebutuhan pendidikan seperti membeli perlengkapan sekolah, biaya transportasi, uang saku hingga untuk uji kompetensi.

Tujuan dari PIP itu sendiri yaitu untuk membantu anak-anak usia sekolah dari keluarga tidak mampu agar dapat menyelesaikan pendidikannya, baik melalui jalur formal seperti SD hingga SMA/SMK, maupun jalur non formal yaitu Paket A, Paket C dan pendidikan khusus. Melalui program PIP tersebut, Pemerintah berupaya untuk mencegah peserta didik putus sekolah dan lewat PIP, Pemerintah juga berharap dapat membuat peserta didik yang putus sekolah untuk dapat melanjutkan kembali pendidikannya.

**a. Tujuan Program Indonesia Pintar**

Seperti yang sudah dijelaskan kalau tujuan PIP adalah untuk memberikan bantuan kepada peserta didik kurang mampu agar dapat menyelesaikan pendidikannya. Dari tujuan tersebut, PIP dilaksanakan berdasarkan prinsip yang sudah ditentukan, seperti:

1. Efisien yaitu menggunakan dana yang ada untuk mencapai sasaran yang sudah ditetapkan dalam waktu yang cepat dan dapat dipertanggungjawabkan.

2. Efektif yaitu dana yang diberikan dapat digunakan untuk kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran.
3. Transparan yaitu adanya keterbukaan agar masyarakat dapat mengetahui informasi mengenai PIP.
4. Akuntabel yaitu segala pelaksanaan kegiatan dapat dipertanggungjawabkan.
5. Kepatutan yaitu kegiatan dapat dilaksanakan dengan realistis dan proporsional.
6. Manfaat yaitu pelaksanaan kegiatan dapat diselenggarakan dengan sejalan sesuai prioritas nasional.

**b. Sasaran Program Indonesia Pintar**

Agar dana bantuan PIP dapat berjalan sesuai yang sudah ditetapkan, Pemerintah menetapkan beberapa kriteria untuk peserta didik yang bisa mendapatkan bantuan PIP. Yakni:

1. Anak sekolah usia 6 hingga 21 tahun.
2. Peserta didik merupakan pemegang KIP (Kartu Indonesia Pintar).
3. Peserta didik berasal dari keluarga Program Keluarga Harapan.
4. Peserta didik dari keluarga Kartu Keluarga Sejahtera.
5. Peserta didik merupakan anak yatim piatu/yatim/piatu/panti asuhan.
6. Peserta didik terkena dampak bencana alam.
7. Peserta didik tidak bersekolah karena tidak memiliki biaya.

8. Peserta didik memiliki kelainan fisik, korban musibah, orangtua terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), berada di daerah konflik hingga berasal dari keluarga terpidana.

### c. Dana Program Indonesia Pintar

Peserta didik yang mendapatkan bantuan PIP akan diberikan sesuai dengan jenjang pendidikan yang ia tempuh. Berikut besaran dana yang diterima peserta didik seperti yang dikutip dari situs Kemendikbud.

1. Peserta didik SD/MI/Paket A akan mendapatkan bantuan PIP sebesar Rp 450 ribu per tahun.
2. Peserta didik SMP/MTS/Paket B akan mendapatkan bantuan PIP sebesar Rp 750 ribu per tahun.
3. Peserta didik SMA/SMK/MA/Paket C akan mendapatkan bantuan sebesar Rp 1 juta per tahun.

Dana yang diberikan harus digunakan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan, baik untuk membeli perlengkapan belajar hingga uang saku peserta didik. Untuk dapat mengklaim bantuan PIP tersebut, ada sejumlah dokumen yang harus dipersiapkan oleh peserta didik, yaitu:

1. Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)
2. Kartu Keluarga (KK)
3. Akta Kelahiran
4. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)
5. Rapor sekolah

6. Surat Pemberitahuan Penerima BSM dari kepala sekolah.

Selain beberapa dokumen tersebut, ada beberapa persyaratan yang harus diperhatikan oleh peserta didik seperti penerima KIP harus terdaftar di lembaga pendidikan formal (SD/SMP/SMA/SMK) maupun non-forma (PKBM/SKB/LKP). Tak hanya itu, KIP milik peserta didik juga harus terdaftar di Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Ada beberapa langkah yang harus dilakukan untuk mendapatkan bantuan Program Indonesia Pintar, antara lain:

1. Peserta didik dapat melakukan pendaftaran di lembaga pendidikan terdekat dengan membawa Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).
2. Jika tidak memiliki KKS, orangtua dapat mengajukan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) di RT/RW dan kelurahan.
3. Sekolah akan mendata peserta dan dikirimkan ke Dinas Pendidikan kota setempat.
4. Sementara untuk sekolah yang berada di naungan Kemendikbud diharuskan untuk memasukkan data peserta didik di aplikasi Dapodik.
5. Jika peserta didik lolos pendaftaran, maka pengambilan dana PIP dapat dilakukan secara perorangan atau kolektif. Pengambilan kolektif untuk pelajar yang tinggal di wilayah yang sulit mengakses bank.

Untuk mendukung pendidikan di Indonesia, Pemerintah juga memberikan bantuan kepada sekolah melalui program dan BOS (Bantuan Operasional Sekolah). Program tersebut ditujukan agar satuan pendidikan dapat memenuhi kebutuhan belajar mengajar.

### C. Kerangka Pikir

Penelitian ini dilakukan di Sekolah Menengah Atas di Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone, untuk mengetahui implementasi PIP, dimana masih didapati beberapa permasalahan berupa bahwa implementasi PIP masih belum begitu baik, dikarenakan masih ditemukan beberapa siswa/siswi yang tergolong keluarga mampu menerima kebijakan ini, sehingga banyak dari siswa/siswi yang kurang mampu mengalahi kesusahan dalam administrasi sekolah. Beberapa orang tua juga mengaku kurangnya informasi dari pemerintah soal kebijakan PIP ini, pendataan yang masih perlu untuk ditingkatkan.

Penelitian tentang Implementasi program PIP akan dianalisis dengan menggunakan model implementasi kebijakan menurut Van Mater dan Van Horn berdasarkan indikator: (1) Standar dan sasaran kebijakan; (2) Sumber daya; (3) komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas; dan (4) karakteristik agen pelaksana; (5) kondisi sosial; (6) disposisi implementor. dikarenakan indicator yang dikembangkan Meter dan Horn merupakan variabel penting yang sangat mempengaruhi implementasi kebijakan.

Uraian yang telah dikemukakan, mendasari lahirnya kerangka pikir penelitian seperti pada gambar berikut :



#### **D. Fokus Penelitian**

Berdasarkan bagan kerangka pikir terkait dengan penelitian Implementasi Program Indonesia Pintar di Jenjang Sekolah Menengah Atas di Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone maka yang menjadi fokus penelitian yaitu: Standar dan sasaran kebijakan, Sumber daya, kumunikasi antar organisasi dan penguatan aktivita, karakteristik agen pelaksana, kondisi sosial, dan disposisi implementor.

#### **E. Deskripsi Fokus Penelitian**

Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka penulis akan lebih memfokuskan penelitian dalam implementasi Program Indonesia Pintar melalui beberapa poin sebagai berikut :

1. Standar dan sasaran kebijakan, Yakni implementasi program indonesia pintar dalam mengukur keberhasilan kebijakan dari ukuran dan tujuannya, di SMA Negeri 17 Bone.
2. Sumber daya, Yakni Mengidentifikasi sumber daya yang tersedia baik sumber daya manusia maupun sumber daya finansial dalam melaksanakan implementasi kebijakan program indonesia pintar di SMA Negeri 17 Bone.
3. Komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas, yaitu proses penyampaian informasi kepada para pelaksana yang konsisten dan seragam dalam melaksanakan implementasi kebijakan program indonesia pintar di SMA Negeri 17 Bone.
4. Karakteristik agen pelaksana adalah para agen pelaksana dalam organisasi formal maupun organisasi informal yang bersifat demokratis dan persuasif dalam melaksanakan implementasi kebijakan program indonesia pintar di SMA Negeri 17 Bone.
5. Disposisi implementor adalah sikap para pelaksana dalam menerima atau menolak keputusan dalam melaksanakan implementasi kebijakan program indonesia pintar di SMA Negeri 17 Bone.
6. Kondisi social ekonomi dan kondisi social politik, Yaitu lingkungan eksternal yang dapat berpengaruh besar bagi para pelaksana dalam melaksanakan implementasi kebijakan program indonesia pintar di SMA Negeri 17 Bone.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu penelitian yang dibutuhkan pada penelitian ini kurang lebih selama 2 (dua) bulan. Lokasi penelitian berada di SMA Negeri 17 Bone kecamatan lamuru kabupaten Bone, peneliti melihat siswa di SMA Negeri 17 Bone ini sebagian besar tinggal jauh dari jalan raya/pelosok sehingga memerlukan biaya tambahan untuk transportasi ke sekolah karena hanya transportasi umum tertentu. setiap sekolah memiliki kebutuhan akademik maupun non akademiknya yang memerlukan biaya yang cukup besar oleh karena itu KIP yang merupakan produk dari PIP sangat di perlukan oleh siswa yang membutuhkan

#### B. Jenis dan Tipe Penelitian

##### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, penelitian kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses penelitian yang dimaksud antara lain adalah melakukan observasi atau pengamatan terhadap informan, berinteraksi dengan mereka dan menggali informasi yang diketahui tentang implementasi kebijakan program indonesia pintar pada jenjang sekolah menengah atas.

## 2. Tipe Penelitian

Adapun tipe penelitian ini adalah tipe penelitian studi kasus Alasan peneliti menggunakan tipe penelitian ini karena karena peristiwa yang diteliti sudah terjadi sehingga data-datanya dapat dilacak kembali melalui wawancara atau dokumen dokumen yang relevan. Tipe penelitian ini sangat berguna untuk mengembangkan inovasi-inovasi yang berguna dalam meningkatkan kualitas hidup manusia.

### C. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini ada 2 (dua), yaitu:

1. Data primer, yang diperoleh secara langsung dari informan yang bersangkutan dengan cara wawancara untuk mendapatkan jawaban yang berkaitan dengan implementasi kebijakan program indonesia pintar dijenjang sekolah menengah atas di Sma 17 Bone Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone
2. Data Sekunder, yang diperoleh dari literatur dan dokumen serta data yang diambil dari siswa berupa hasil studi dokumentasi.

### D. Informan Penelitian

Informan dalam penelitian kualitatif, adalah mereka yang memahami tentang informasi suatu objek penelitian. Informan yang akan dipilih harus memiliki kriteria agar informasi yang didapatkan bermanfaat untuk penelitian yang dilakukan. Informan yang akan dipilih oleh peneliti adalah mereka yang memiliki keterkaitan dengan program indonesia pintar, dengan menggunakan

teknik key person. Teknik memperoleh informan penelitian menggunakan teknik Purposive Sampling, yaitu teknik dimana peneliti menentukan pengambilan sampel dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian. Adapun informan dalam penelitian ini berjumlah 5 orang, yaitu sebagai berikut:

- kepala sekolah (1) orang
- guru (1) orang
- siswa (2) orang
- Dinas Pendidikan (1) orang

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, menggunakan:

(1) Wawancara; (2) Studi dokumentasi; dan (3) Observasi.

##### **1. Wawancara**

Dilakukan guna memperoleh data primer tentang informasi kebijakan program Indonesia pintar di jenjang sekolah menengah atas di Sekolah Menengah Atas se-kecamatan lamuru kabupaten Bone.

##### **2. Studi dokumentasi**

Dilakukan guna mendapatkan data sekunder dengan cara melakukan kajian terhadap data-data dokumen pribadi dan dokumen resmi, baik visual maupun berupa tulisan yang berkaitan dengan masalah penelitian berupa penilaian Implementasi Kebijakan Program Indonesia Pintar Dijenjang Sekolah Menengah Atas Di kecamatan lamuru kabupaten bone.

### 3. Observasi

Melakukan pengamatan langsung di lokasi penelitian secara berulang terhadap suatu objek pengamatan pada tempat yang sama ataupun berbeda. Observasi difokuskan pada pengamatan langsung terhadap tingkat kebutuhan siswa/siswi dengan PIP.

#### F. Teknik Analisis Data

Data yang terkumpul pada penelitian ini adalah data kualitatif, sehingga teknik analisisnya sesuai dengan yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman sebagaimana yang dikutip Sugiyono yaitu dilakukan secara interaktif, yang dapat dijelaskan dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut :

##### 1. Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemisahan, perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Laporan atau data yang diperoleh di lapangan akan dituangkan dalam bentuk uraian yang lengkap dan terperinci. Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya akan cukup banyak, sehingga perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, serta dicari tema dan polanya.

Dengan demikian, data telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan dan selanjutnya data yang diperoleh dari lokasi akan peneliti tuangkan dalam uraian laporan lengkap dan terperinci.

## 2. Penyajian Data

Penyajian data akan dilakukan dengan tujuan untuk mempermudah peneliti dalam melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian tertentu dari penelitian. Penyajian data dilakukan dengan cara mendeskripsikan hasil wawancara yang dituangkan dalam bentuk uraian teks naratif, dan didukung oleh dokumen-dokumen, serta foto-foto maupun gambar dx

## 3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan yaitu melakukan verifikasi secara terus menerus sepanjang proses penelitian berlangsung, yaitu selama proses pengumpulan data. Peneliti berusaha untuk menganalisis dan mencari pola, tema, hubungan persamaan, hal-hal yang sering timbul, hipotesis dan sebagainya yang dituangkan dalam kesimpulan alternatif. Dalam penelitian, penarikan kesimpulan dilakukan dengan pengambilan intisari dari rangkaian kategori hasil penelitian berdasarkan observasi dan wawancara.

## G. Pengabsahan Data

Selain menganalisis data, peneliti juga harus menguji keabsahan data agar memperoleh data yang valid. Untuk menetapkan keabsahan data tersebut diperlukan teknik pemeriksaan. Dalam pengecekan keabsahan data yang meliputi uji kredibilitas data, uji dependabilitas, uji transferabilitas dan uji konfirmasi.

Namun yang lebih utama adalah uji kredibilitas data meliputi :

1. Triangulasi sumber, dengan menguji kredibilitas data melalui pengecekan data yang telah diperoleh dari beberapa sumber.
2. Triangulasi teknik, dengan menguji kredibilitas data melalui pengecekan data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.
3. Triangulasi waktu, dengan menguji kredibilitas data melalui pengecekan dengan wawancara, observasi, atau teknik lain dalam waktu atau situasi berbeda.



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Deskripsi Lokasi Penelitian

SMA Negeri 17 Bone merupakan salah satu sekolah yang berpartisipasi dalam program pemerintah yang berupa Kartu Indonesia pintar. Sekolah ini beralamat di Jalan Poros Makassar – Soppeng KM. 129 Kel. Lalebata Kec. Lamuru Kab. Bone. Sekolah ini memiliki NPSN/NSS 40302665/301190714001 dan mempunyai letak geografis lintang -4,599, Bujur 119,974.

##### 1. Visi dan Misi Sekolah

###### a. Visi

“Terwujudnya Insan Beriman, Unggul Prestasi, Cendekiawan Sejati, Professional Dalam Layanan, Kompetitif Dalam Dunia Era Globalisasi.”

###### b. Misi

Misi sekolah ini dapat dijabarkan sebagai berikut :

- Pembinaan siswa yang berorientasi terhadap keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia.
- Mempersiapkan insan – insan yang berkualitas baik di bidang akademik maupun non akademik.
- Mambangun/mengembangkan pelayanan professional dalam berkolaborasi baik secara internal (akademis sekolah) maupun secara eksternal (sekolah, pemerintah dan masyarakat).

- Mengembangkan nuansa kompetitif (guru, staf dan siswa) dalam rangka globalisasi unruk mengagas masa depan yang penuh tantangan.
- Mempersiapkan peserta didik agar menjadi manusia ang berkepribadian, cerdas, berprestasi dan berkualitas dalam bidang akademik maupun non akademik secara berkelanjutan.
- Mengelola tenaga pendidik dan kependidikan secara efektif berdasarkan analisis kebutuhan, perencanaan, pengembangan, evaluasi kerja dan hubungan kerja.
- Menciptakan system kebersamaan melalui teamwork yang kompak, cerdas dan dinamis.
- Menciptakan sikap kemandirian secara kelembagaan melalui peningkatan sumber daya yang memadai.

## 2. Keadaan Siswa Dan Tenaga Pendidik

### a. Data Siswa Tahun Ajaran 2020/2021 :

Kelas X jumlah Rombel 6 dengan jumlah siswa 171 orang, kelas XI jumlah rombel 6 dengan jumlah siswa 168 orang, kelas XII jumlah rombel 5 dengan jumlah siswa 165 orang. Dengan total keseluruhan 17 rombel dan 504 siswa.

Adapun daftar siswa penerima Program Indonesia Pintar SMAN 17 Bone sebagai berikut :

Tabel 4.1. daftar siswa penerima PIP SMAN 17 BONE

NO.	KATEGORI	JUMLAH
1.	Laki-Laki	73
2.	Perempuan	70
Total = 143		

Sumber : DISDIK Provinsi SULSEL

b. Data Tenaga Pendidik

Kepala Sekolah 1 orang, Wakil Kepala Sekolah 4 orang, Guru Tetap 16 orang, Guru Tidak Tetap 13 orang, Pegawai Tidak Tetap 6 orang, jumlah personil 40 orang.

3. Sarana Dan Prasarana Pendukung

Tabel 4.2. Sarana dan Prasarana Pendukung SMAN 17 BONE

NO.	NAMA RUANGAN	JUMLAH
1.	Ruang Belajar	21
2.	Ruang Kepala Sekolah	1
3.	Ruang Guru	1
4.	Ruang Tata Usaha	1
5.	Ruang Layanan BK	1
6.	Ruang Tamu	1
7.	Perpustakaan	1
8.	Laboratorium IPA	1
9.	Laboratorium Komputer	1
10.	Laboratorium Bahasa	1
11.	Aula	1
12.	Masjid	1
13.	Lapangan Basket	1
14.	Lapangan Volly	1
15.	Lapangan Takraw	1
16.	Lapangan Futsal	1
17.	Lapangan Lompat Jauh	1
18.	Perumahan	3
Total = 40 Ruangan		

## B. Hasil Penelitian

Program Indonesia Pintar yang selanjutnya disebut Kartu Indonesia Pintar adalah bantuan berupa uang tunai dari pemerintah yang diberikan kepada peserta didik yang orang tuanya tidak dan/ atau kurang mampu membiayai pendidikannya, sebagai kelanjutan dan perluasan sasaran dari program Bantuan Siswa Miskin (Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020). Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.

Program Indonesia Pintar dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah, Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota, dan Satuan Pendidikan. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyediakan Kartu Indonesia Pintar (KIP) berdasarkan Basis Data Terpadu (BDT) yang dikeluarkan oleh Tim Nasional Percepatan 77 Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Pembiayaan pencetakan KIP dibebankan kepada anggaran direktorat jenderal terkait sesuai dengan kuota nasional masing-masing.

Proses Implementasi kebijakan terdiri dari enam tahap menurut Van Mater dan Van Horn yaitu : (1) *Standar dan sasaran kebijakan* yakni implementasi kebijakan dalam mengukur keberhasilan kebijakan dari ukuran dan tujuannya. Ketika ukuran dan dan sasaran kebijakan terlalu ideal maka akan sulit direalisasikan. untuk mengukur kinerja implementasi kebijakan tentunya menegaskan standar dan sasaran tertentu yang harus dicapai oleh para pelaksana kebijakan. (2) *Sumber daya* yakni kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia baik sumber

daya manusia maupun sumber daya finansial. (3) *kumunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas* yakni proses penyampaian informasi kepada para pelaksana yang konsisten dan seragam dalam melaksanakan implementasi kebijakan (4) *karakteristik agen pelaksana* yakni Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat dalam pengimplementasian kebijakan (5) *kondisi sosial* yakni lingkungan eksternal yang dapat berpengaruh besar bagi para pelaksana dalam melaksanakan implementasi, dan (6) *disposisi implementor* yakni sikap para pelaksana dalam menerima atau menolak keputusan dalam melaksanakan implementasi kebijakan.

#### **1. Standar dan sasaran kebijakan**

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya dari ukuran dan tujuan kebijakan yang bersifat realistis dengan sosiokultur yang ada di level pelaksana kebijakan. Ketika ukuran dan sasaran kebijakan terlalu ideal (utopis), maka akan sulit direalisasikan (agustino 2006). Van Meter dan Va Horn (Sulaeman 1998) mengemukakan untuk mengukur kinerja implementasi kebijakan tentunya menegaskan standar dan sasaran tertentu yang harus dicapai oleh para pelaksana kebijakan, kinerja kebijakan pada dasarnya merupakan penilaian atas tingkan ketercapaian standar dan sasaran tersebut.

Sasaran penerima Kartu Indonesia Pintar menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar adalah anak berusia 6 sampai dengan 21 tahun yang merupakan: Penerima BSM 2014 Pemegang KPS, Siswa/anak

dari keluarga pemegang KPS/ KKS/ KIP yang belum menerima BSM 2014, Siswa/anak dari keluarga peserta Program Keluarga Harapan (PKH) non KPS, Siswa/anak yang berstatus yatim piatu/yatim/piatu dari Panti Sosial/Panti Asuhan, Siswa/anak yang terkena dampak bencana alam; Anak usia 6 sampai dengan 21 tahun yang tidak bersekolah (dro-out) yang diharapkan kembali bersekolah. Dengan dana bantuan persiswa sebesar Rp 500.000,-/Semester. Sesuai dengan pernyataan dari RK selaku siswa penerima PIP SMAN 17 BONE menyatakan bahwa :

“uang yang ku terima itu 500 ribu, alhamdulillah cukup ji untuk bantu orang tua ringankan bebannya dan alhamdulillah juga banyak teman-temanku juga dapat itu bantuan tapi ada juga yang tidak dapat padahal nda mampu juga keluarganya”

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa Adapun nominal dana yang diterima oleh siswa yaitu sebesar Rp 500.000 untuk tingkat menengah atas berbeda dengan tingkat SD dan yang dimana ini sudah sesuai dengan kebijakan yang di yang diberlakukan.

Dalam pernyataan Presiden Joko Widodo, program indonesia pintar dirancang khusus untuk membantu anak dari keluarga tidak mampu agar tetap mendapatkan layanan pendidikan sampai Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah. PIP juga membantu meringankan biaya personal pendidikan, mencegah agar siswa tidak putus sekolah, serta mendorong di satuan pendidikan formal maupun non-formal. Hal sesuai dengan yang disampaikan oleh Bapak HM selaku Tim Manajemen PIP SMA Provinsi Sulsel, bahwa :

“Kartu Indonesia Pintar diberikan khususnya untuk siswa dari keluarga miskin atau yatim piatu. Bantuan ini diberikan sebagai penunjang siswa yang kurang mampu atau anak yatim piatu agar tak putus sekolah. (hasil wawancara pada tanggal 17 september 2020).”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut bahwa Bantuan Program Indonesia Pintar diprioritaskan untuk siswa miskin, siswa yang bersekolah ataupun yang tidak bersekolah agar kembali bersekolah dengan adanya bantuan tersebut, bantuan berupa uang tunai dapat digunakan siswa memenuhi kebutuhannya disekolah agar tidak ada lagi siswa yang tidak bersekolah dengan alasan tidak ada biaya pendidikan.

Pada instansi pemerintah di Kabupaten Bone menjelaskan bahwa dengan adanya bantuan Program Indonesia Pintar yang di prioritaskan untuk siswa yang kurang mampu maupun yang putus sekolah, diharapkan dapat membantu dan meringankan beban orang tua dalam hal pembiayaan. Dalam hal ini sesuai dengan pernyataan Bapak YS selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 17 Bone juga mengungkapkan bahwa :

“Kartu Indonesia Pintar adalah bantuan untuk siswa miskin atau yang kurang mampu agar mereka tetap bisa bersekolah dengan layak dan tidak kekurangan dalam biaya pendidikannya (hasil wawancara pada tanggal 25 september 2020).”

Bantuan Kartu Indonesia Pintar diprioritaskan untuk siswa miskin, penerima Kartu Indonesia Pintar adalah siswa yang berasal dari keluarga yang memang dalam hal pembiayaan pendidikan masih dalam taraf kurang mampu. Dengan adanya Kartu Indonesia Pintar untuk bisa mensejahterakan siswa agar dapat berkembang dan bersekolah dengan layak.

Pendapat tersebut juga didukung oleh Ibu RS selaku guru BK yang menangani kartu indonesia pintar di SMA Negeri 17 Bone, bahwa :

“Kartu indonesia pintar ini di tujukan untuk siswa yang kurang mampu, agar tetap bersekolah dan melanjutkan pendidikannya, kartu indonesia pintar ini membantu para siswa untuk membeli peralatan sekolah, membayar transportasi dan uang saku. Kartu ini juga mengurangi sedikit beban orang tua siswa (hasil wawancara pada tanggal 25 september 2020).”

Pemberian bantuan melalui Kartu Indonesia Pintar maupun bantuan pendidikan lainnya guna mendukung program Wajib Belajar bertujuan untuk meringankan beban biaya yang terlalu berat bagi orang tua yang berasal dari status ekonomi bawah. Bantuan ini dapat digunakan untuk biaya transportasi mereka ke sekolah serta siswa yang kekurangan uang saku dapat terpenuhi uang sakunya.

Berdasarkan wawancara dari beberapa informan di atas dapat disimpulkan bahwa, Program Indonesia Pintar yang berbentuk kartu indonesia pintar ini di tujukan untuk siswa yang kurang mampu dan yatim piatu yang kesulitan dalam biaya pendidikan sehingga harus putus sekolah, sesuai dengan pendapat dari Van Meter dan Van Horn dalam Subarsono (2005:3) yang mengatakan bahwa Standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur, sehingga pencapaian tujuan dalam implementasi kebijakan PIP ini dapat tercapai.

## 2. Sumber daya

Manusia merupakan sumber daya terpenting dalam menentukan keberhasilan implementasi. Keberhasilan implementasi kebijakan sangat

tergantungan dari kemampuan memanfaatkan sumber daya manusia dan finansial sebagai objek pendukung terlaksananya implementasi. Setiap tahap implementasi menuntut adanya sumber daya yang berkualitas sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan.

Sesuai dengan tujuan pendidikan nasional maka pemerintah Kabupaten Bone untuk sektor pendidikan diarahkan pada upaya peningkatan mutu pendidikan, dalam hal ini diharapkan pula adanya peningkatan relevansi pendidikan serta mempunyai keterkaitan yang sesuai dengan kebutuhan tuntutan. Oleh karena itu mutu pendidikan selalu ditingkatkan sebagai upaya peningkatan SDM agar menguasai Iptek, akan tetapi beberapa siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu sulit bahkan harus putus sekolah, oleh karena itu pemerintah memberikan bantuan Program Indonesia Pintar bagi siswa yang kurang mampu atau putus sekolah sehingga dapat bersekolah kembali.

Sumber daya yang dimiliki Dinas Pendidikan dan SMA Negeri 17 Bone dalam implementasi Program Indonesia Pintar sudah terstruktur dengan baik mulai dari bidang Tim Manajemen PIP SMA Provinsi Sulsel, Kepala Sekolah, Guruk BK, Wali Kelas, dan Orang Tua siswa. Sesuai dengan pernyataan Bapak HM selaku Tim Manajemen PIP SMA Provinsi Sulsel, bahwa :

“Kesiapan para pelaksana dalam menyebarluaskan informasi terkait PIP ini sudah dilaksanakan semaksimal mungkin melalui sosialisasi

semua sekolah yang dilaksanakan sebelum covid-19 yang di selenggarakan langsung oleh KEMENDIKBUD, dan kemudian melalui surat edaran kepala dinas pendidikan provinsi setelah diberlakukan PSSB, kami juga memaksimalkan terkait jadwal pencairan, mekanisme pencairan, batas waktu penyusunan, dll. Hanya saja kurangnya anggaran pendukung di provinsi. (Hasil wawancara pada tanggal 17 september 2020).

Berdasarkan pernyataan di atas, para pelaksana PIP telah melaksanakan dengan maksimal baik dari penyampaian informasi terkait jadwal pencairan, mekanisme pencairan dan langkah selanjutnya. dalam mensosialisasikan PIP anggaran yang di pakai langsung dari KEMENDIKBUD, dengan adanya covid-19 penyampaian informasi ke setiap sekolah hanya melalui surat edaran, sehingga terjadi keterlambatan informasi dan anggaran pendukung dalam mensosialisasikan PIP tersebut.

Pada SMA Negeri 17 Bone telah mendukung implementasi kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) seperti sumber daya manusia dan mengimplementasikan kebijakan. Sesuai dengan pernyataan Bapak YS Kepala Sekolah SMA Negeri 17 Bone, yaitu :

“dalam melakukan pembagian tugas agar penyaluran PIP ini berjalan lebih efektif, kemudian kami adakan sosialisasi kepada siswa dan wali murid terkait kartu indonesia pintar, sosialisasi ini di adakan 2 kali, pertama untuk mengetahui apa itu Program Indonesia Pintar dan kedua bagaimana pemanfaatan dana dari Program Indonesia Pintar ini. (hasil wawancara pada tanggal 25 september 2020).

Berdasarkan pernyataan di atas, pihak sekolah melakukan pembagian tugas agar penyampaian informasi terkait program indonesia pintar dapat dilaksanakan semaksimal mungkin, serta mengadakan sosialisasi yang

dilakukan 2 kali yaitu untuk mengetahui program indonesia pintar dan manfaatnya.

Lebih lanjut pendapat dari Ibu RS selaku guru BK di SMA Negeri 17 Bone mengungkapkan bahwa :

“Pembagian tugas PIP masuk dalam SK pembagian Tugas dari Kepala Sekolah dalam pembagian Tugas Guru. Sosialisasi KIP dilaksanakan dua kali, kepada siswa dan wali murid. Setelah mendapat informasi siapa saja yang menerima PIP ini, kemudian di sosialisai kedua diarahkan kemanfaatan dana KIP bagi siswa, bagaimana langkah selanjutnya setelah dana cair. Disamping itu juga menempel informasi PIP pada papan pengumuman sekolah.” (hasil wawancara pada tanggal 25 september 2020)

Berdasarkan pernyataan di atas, pembagian tugas masuk dalam SK pembagian tugas dari kepala sekolah, selain dari pembagian tugas dan sosialisasi yang di tujukan untuk siswa dan wali, pemberian informasi PIP ini juga dilakukan dengan menempelkan informasi-informasi tentang PIP dan dipajang atau ditempel pada papan pemengumuman sekolah.

Berdasarkan wawancara dengan beberapa informan di atas bahwa, sumber daya merupakan aspek penting dalam implementasi kebijakan, mulai dari bagaimana melakukan pembagian tugas dalam mensosialisasikan PIP.

### **3. Komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas**

Koordinasi merupakan mekanisme yang efektif dalam mengimplementasikan kebijakan publik. Semakin baik komunikasi dan koordinasi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses

implementasi, maka kesalahan-kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi. Dan begitu pula sebaliknya.

Menurut Van Horn dan Van Mater (dalam Widodo 1974) apa yang menjadi standar tujuan harus dipahami oleh para individu (implementors). Yang bertanggung jawab atas pencapaian standar dan tujuan kebijakan, karena standar dan tujuan harus dikomunikasikan kepada para pelaksana. Komunikasi dalam kerangka penyampaian informasi kepada para pelaksana kebijakan yang menjadi standar dalam tujuan harus konsisten dan seragam (consistency and uniformity) dari berbagai sumber informasi.

Dinas Pendidikan Bone menjelaskan bahwa syarat penerimaan bantuan tersebut diprioritaskan bagi anak kategori kurang mampu yang memiliki kartu indonesia pintar yang tercatat di data pokok Dapodik, ribuan siswa yang menerima bantuan PIP tersebut sebelumnya dilakukan pendataan melalui kepala sekolah masing-masing dan melibatkan orang tua. Hal ini sesuai dengan pernyataan Ibu RS selaku guru BK di SMA Negeri 17 Bone mengatakan bahwa :

“saya infokan kepada para wali kelas untuk mendata anak wali meraka yang masuk kategori untuk menerima bantuan program indonesia pintar, dan memberikan arahan dalam menyiapkan berkas apa saja yang perlu dipersiapkan oleh para siswa.” (hasil wawancara pada tanggal 25 september 2020)

Berdasarkan pernyataan diatas bahwa, pada indicator ini sangat berkaitan dengan indikator sumber daya yang dimana pembagian tugas dan penyampain informasi sangat di perlukan dan dilakukan dengan, komunikasi

yang baik antara guru BK dan wali kelas harus terjalin dengan baik agar data siswa tidak bermasalah.

Tanggapan lain dari RK selaku Siswa SMA Negeri 17 Bone mengatakan bahwa :

“wali kelas bilang sampaikan ini info ke orang tua, karena nanti mau di berikan pengarahan tentang program indonesia pintar ini”.(hasil wawancara pada tanggal 16 oktober 2020)

Berdasarkan pernyataan di atas bahwa, informasi yang diberikan oleh guru BK disampaikan dengan baik oleh wali kelas kepada siswa, dalam pernyataan tersebut pihak sekolah melibatkan orang tua siswa dalam pemberian pemahaman mengenai program indonesia pintar.

Dalam melaksanakan implementasi program indonesia pintar, tidak menutup kemungkinan ditemukannya beberapa hambatan, oleh karenanya diperlukan komunikasi yang baik disetiap pelaksana untuk meminimalisir kesalahan yang terjadi. Dalam hal ini sesuai dengan pernyataan Bapak HM selaku Tim Manajemen PIP SMA Provinsi Sulsel mengatakan bahwa :

“jadi semua sudah ada tugasnya masing-masing, kalau dalam melaksanakan program indonesia pintar ada maslaah atau hambatan pasti langsung melapor seperti salah input data.” (hasil wawancara tanggal 25 september 2015).

Dari hasil pernyataan di atas, ketika mendapat kesalahan seperti pengimputan data para pelaksana tugas langsung sigap untuk melaporkan kesalahan dalam pengimputan data program indonesia pintar.

Berdasarkan wawancara dengan beberapa informan di atas bahwa, indicator sumber daya berkaitan dengan komunikasi dalam memberikan

informasi dan pengimputan data agar tidak mengalami kesalahan sehingga informasi dalam pemberian pemahaman mudah di pahami dan di jalankan oleh orang tua siswa/i.

Berdasarkan hal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa komunikasi dan sumber daya sangat berkaitan, semakin baik SDM yang ada maka komunikasi setiap para pelaksana juga baik. Komunikasi setiap para pelaksana harus selalu di lakukan untuk meminimalisir terjadinya kesalahan.

#### **4. Karakteristik Agen Pelaksana**

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal yang akan terlibat dalam pengimplementasian kebijakan. Hal ini penting karena kinerja implementasi kebijakan akan sangat dipengaruhi oleh ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya. Hal ini berkaitan dengan konteks kebijakan yang akan dilaksanakan pada beberapa kebijakan dituntut pelaksana kebijakan yang ketat dan disiplin.

Pada konteks lain diperlukan agen pelaksana yang demokratis dan persuasif. Selain itu, cakupan atau luas wilayah menjadi pertimbangan penting dalam menentukan agen pelaksana kebijakan. Menurut Edward III, ada 2 karakteristik utama dari struktur birokrasi adalah prosedur-prosedur kerja standar (SOP = Standard Operating Procedures) dan fragmentasi.

- a. Standard Operating Procedures (SOP). SOP dikembangkan sebagai respon internal terhadap keterbatasan waktu dan sumber daya dari pelaksana dan keinginan untuk keseragaman dalam bekerjanya organisasi-organisasi yang kompleks dan tersebar luas. SOP yang

bersifat rutin didesain untuk situasi tipikal di masa lalu mungkin menghambat perubahan dalam kebijakan karena tidak sesuai dengan situasi atau program baru. SOP sangat mungkin menghalangi implementasi kebijakan-kebijakan baru yang membutuhkan cara-cara kerja baru atau tipe-tipe personil baru untuk mengimplementasikan kebijakan. Semakin besar kebijakan membutuhkan perubahan dalam cara-cara yang rutin dari suatu organisasi, semakin besar probabilitas SOP menghambat implementasi (Edward III, 1980).

- b. Fragmentasi berasal terutama dari tekanan-tekanan di luar unit-unit birokrasi, yang membuat kebijakan yang mempengaruhi organisasi birokrasi publik. Fragmentasi adalah penyebaran tanggung jawab terhadap suatu wilayah kebijakan di antara beberapa unit organisasi. "fragmentation is the dispersion of responsibility for a policy area among several organizational units." (Edward III, 23 1980). Semakin banyak aktor-aktor dan badan-badan yang terlibat dalam suatu kebijakan tertentu dan semakin saling berkaitan keputusan-keputusan mereka, semakin kecil kemungkinan keberhasilan implementasi. Edward menyatakan bahwa secara umum, semakin koordinasi dibutuhkan untuk mengimplementasikan suatu kebijakan, semakin kecil peluang untuk berhasil (Edward III, 1980).

Dalam pernyataan MENKO PKM (Kementrian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan) menyampaikan bahwa proses indintifikasi anak sekolah juga perlu melibatkan peran pemerintah daerah,

sehingga bisa mendukung proses penjangkauan dan meminimalisir kesalahan dalam program indonesia pintar. Oleh karena itu perlu di perhatikan SOP dan mekanisme yang berlaku untuk memastikan persiapan penjangkauan anak tidak sekolah. Hal ini sesuai dengan pernyataan Bapak HM selaku Tim Manajemen PIP SMA Provinsi Sulsel mengatakan bahwa :

“kebijakan ini sudah ideal dan cocok dengan SOP yang ada, jadi masalah disini pengimputan data seperti anak yatim piatu, yang tidak selamanya orang miskin tetapi di mekanise yang ada menyatakan bahwa semua anak yatim piatu masuk dalam kategori tersebut adapun tekanan yang dirasakan dari pihak sekolah ialah ketika kesalahan dalam pengimputan data” (hasil wawancara pada tanggal 17 september 2020)

Berdasarkan pernyataan di atas, SOP yang ada sudah cocok dengan kebijakan program indonesia pintar dimana pada bagian mekanisme untuk kategori anak yatim piatu bersyarat untuk menerima bantuan program indonesia pintar padahal tidak semua anak yatim piatu tergolong orang miskin.

Di Kabupaten Bone, implementasi kebijakan indonesia pintar perlu di perhatikan SOP yang ada akan tetapi selain dari SOP, Tekanan yang di rasakan oleh pihak sekolah SMA Negeri 17 Bone menjadi salah satu hal yang penting di perhatikan karena dapat menimbulkan kesalah pahaman dari pihak sekolah dan orang tua terlebih mengenai pendataan. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Bapak YS Kepala Sekolah SMA Negeri 17 Bone yang mengatakan bahwa :

“salah satu tekanan yang di rasakan yaitu terkadang datang dari pihak wali dari siswa yang memperlmasalahkan tentang program ini karena pihak sekolah dianggap tidak mendata siswa secara menyeluruh.” (hasil wawancara pada tanggal 25 september 2020)

Pendapat lain oleh MD selaku Siswa SMA Negeri 17 Bone

mengatakan bahwa :

“ada beberapa temanku kak yang kurang mampu, tapi tidak dapat bantuan program indonesia pintar karena tidak adanya kartu KPS nya dimana orang tua wali tidak mengindahkan informasi dan arahan yang telah di sampaikan.”(hasil wawancara tanggal 25 september 2020)

Berdasarkan pernyataan kepala sekolah dan siswa di SMA Negeri 17 Bone, kebijakan program indonesia pintar tidak cocok dengan mekanisme yang ada, persyaratan dan mekanisme program indonesia pintar salah satunya kelengkapan berkas yang dimana ialah KPS dan anak yatim piatu sebagai salah satu syarat yang di perlukan untuk mendapat bantuan, yang membuat tidak meratanya bantuan program indonesia pintar ini.

Dari hasil wawancara setiap informan di atas disimpulkan bahwa, kebijakan PIP dalam karakteristik agen pelaksana telah menjalankan sesuai dengan SOP dan kategori tekanan berasal dari keluhan wali murid yang tidak dapat mengindahkan himbauan dan atau pemberitahuan dari pihak sekolah.

Sejalan dengan observasi di lapangan yang dilakukan peneliti karakteristik agen pelaksana dan standar dan sasaran kebijakan berkaitan dimana yang menjadi pokok permasalahan mekanisme yang ada seperti keluhan dari orang tua siswa kurang mampu yang tidak mendapat bantuan program indonesia pintar, akan tetapi SOP yang ada sudah cocok dengan kebijakan ini.

Berdasarkan hal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa dalam indicator karakteristik agen pelaksana SOP yang di berlakukan sudah sesuai dengan kebijakan, hanya saja fregmentasi atau keluhan masih di rasakan pihak

sekolah karena beberapa orang tua mengeluh akibat anak mereka tidak mendapatkan bantuan PIP.

### **5. Sikap Para pelaksana**

Menurut pendapat Van Metter dan Van Horn dalam Agustinus (2006): "sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana kebijakan sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul permasalahan dan persoalan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan publik biasanya bersifat top down yang sangat mungkin para pengambil keputusan tidak mengetahui bahkan tak mampu menyentuh kebutuhan, keinginan atau permasalahan yang harus diselesaikan".

Sikap mereka dipengaruhi oleh pandangannya terhadap suatu kebijakan dan cara melihat pengaruh kebijakan itu terhadap kepentingan organisasinya dan kepentingan pribadinya. Van Maier dan Van Horn (1974) menjelaskan disposisi bahwa implementasi kebijakan diawali penyaringan (befiltered) lebih dahulu melalui persepsi dari pelaksana (implementors) dalam batas dimana kebijakan itu dilaksanakan. Terdapat tiga macam elemen respon yang dapat mempengaruhi kemampuan dan kemauannya untuk melaksanakan suatu kebijakan, antara lain terdiri dari pertama, pengetahuan (cognition), pemahaman dan pendalaman (comprehension and understanding) terhadap kebijakan, kedua, arah respon mereka apakah menerima, netral atau menolak

(acceptance, neutrality, and rejection), dan ketiga, intensitas terhadap kebijakan.

Program Indonesia Pintar merupakan salah satu program prioritas Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan (KEMENDIKBUD) yang dapat memberikan banyak manfaat kepada masyarakat yang kurang mampu, oleh karena itu diperlukan kerja sama dan dukungan dalam implementasi Program Indonesia Pintar. Sesuai dengan pernyataan oleh Bapak HM selaku Tim Manajemen PIP SMA Provinsi Sulsel mengatakan bahwa :

“Mereka semua sangat memahami apa yang menjadi keinginan dari MENDIKBUD dengan dilaksanakannya program ini.” (hasil wawancara pada tanggal 17 september 2020)

Berdasarkan hasil wawancara di atas selama proses penelitian dimana para pelaksana sangat memahami program ini. Terutama tujuan dilaksanakannya. Kemudian siswa yang datang untuk menanyakan informasi mengenai program ini pun langsung dilayani sesuai dengan apa yang ditanyakan dan tak perlu menunggu lama.

Dalam implementasi kebijakan Program Indonesia Pintar Pemerintah Bone sangat serius dalam menjalankan Program tersebut karena dapat menyelesaikan permasalahan perekonomian masyarakat Didukung oleh penjelasan dari Ibu RS selaku guru BK di SMA Negeri 17 Bone mengungkapkan bahwa :

“program ini dilakasnakan sudah sebaik mungkin, saya dan semua guru mendukung kebijakan ini dan bekerja sama dalam mensukseskan program ini.” (hasil wawancara pada tanggal 25 september 2020)

Berdasarkan hasil wawancara di atas, semua guru dan staf sangat mendukung kebijakan program indonesia pintar (PIP) dan semua berkerja sama dalam mensukseskan program tersebut.

Dari hasil wawancara dengan informan di atas dapat disimpulkan bahwa, para pelaksana dari dinas pendidikan dan sekolah, memahami dan menerima kebijakan program indonesia pintar serta mendukung keberhasilan kebijakan tersebut.

Sejalan dengan observasi di lapangan yang dilakukan peneliti sikap para pelaksana memang memahami apa tujuan dari kebijakan ini sehingga mereka melaksanakan implementasi kebijakan ini dengan maksimal, dengan memberikan informasi kepada siwa dan orang tua.

Berdasarkan hal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa disposisi implementor sudah melaksanakan tugas dalam implementasi kebijakan ini dengan baik karena mereka memahami bagaimana kebijakan ini, dalam meberikan pelayanan dan memberikan informasi sudah sangat baik.

## **6. Kondisi Sosial, Ekonomi dan Politik**

Hal terakhir yang perlu juga diperhatikan guna menilai kinerja implementasi publik dalam perspektif yang ditawarkan oleh Van Metter dan Van Horn (1974) adalah, sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan.

Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi objek masalah dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Dalam

hal itu, upaya untuk mengimplementasikan kebijakan harus pula memperhatikan kekondusifan lingkungan eksternal. Dalam penelitian ini, lingkungan ekonomi tidak ditemukan memiliki pengaruh terhadap proses implementasi program ini. Jadi tidak dibahas dalam penelitian ini.

Program Indonesia Pintar, merupakan bantuan yang diterima dan didukung oleh masyarakat terkhusus dalam penelitian ini adalah orang tua siswa. Hal tersebut sesuai dengan Ibu RS selaku guru BK yang mengatakan bahwa:

“Ada beberapa orang tua yang pergi ke sekolah untuk menanyakan tentang kejelasan program indonesia pintar ini kepada wali kelas dan mereka mendapat informasi tersebut berdasarkan pengumuman yang langsung di sampaikan oleh wali masing-masing murid.” (Wawancara pada tanggal 25 september 2020)

Jadi hal tersebut mengindikasikan bahwa lingkungan sosial dalam hal ini orang tua siswa turut mendorong keberhasilan implementasi program ini, karena orang tua yang langsung mendatangi pihak pelaksana.

Dari penjelasan di atas selain lingkungan sosial, lingkungan politik juga memiliki peran penting dalam implementasi kebijakan Program Indonesia Pintar, Salah satu yang termasuk lingkungan politik adalah instansi pemerintah. Berdasarkan penuturan dari Bapak HM selaku Tim Manajemen PIP SMA Provinsi Sulsel yang mengatakan bahwa:

“Ada staf khusus yang selalu menanyakan progres implmentasi program ini di KEMENDIKBUD. Staf tersebut mendukung dan ikut membantu jika kami mengalami kesulitan.” (Wawancara tanggal 25 september 2020)

Berdasarkan hal tersebut, dapat dikatakan bahwa lingkungan politik juga turut mendorong keberhasilan program ini. Karena program tersebut merupakan bantuan yang penting, maka ada staf yang selalu mengawal proses implementasi program ini dan juga ikut membantu jika para pelaksana mengalami kesulitan.

Dari hasil wawancara dengan informan di atas dapat disimpulkan bahwa, lingkungan sosial dan politik berpengaruh penting terhadap keberhasilan kebijakan program indonesia pintar serta dilihat dari dukungan dari orang tua dan staf khusus yang mendorong dan membantu dalam kebijakan program tersebut.

Sejalan dengan observasi di lapangan yang dilakukan peneliti lingkungan sosial dan politik dalam implementasi program indonesia pintar orang tua mendukung progma tersebut karena bantuan ini mengurangi beban mereka serta satf khusus yang membantu dalam keberhasilan kebijakan tersebut.

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan, lingkungan sosisal ekonomi dan poliik, menjadi salahsatu penunjang menjadikan program indonesia pintar ini bisa mencapai tujuan yang di harapkan.

## **C. Pembahasan**

### **1. Standar dan Sasaran Kebijakan**

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya dari ukuran dan tujuan kebijakan yang bersifat realistis dengan sosiokultur yang ada dilevel peleksana kebijakan. Ketika ukuran dan sasaran kebijakan terlalu ideal (utopis), maka akan sulit direalisasi (agustino 2006). Van

Meter dan Va Horn (Sulaeman 1998) mengemukakan untuk mengukur kinerja implementasi kebijakan tentunya menegaskan standar dan sasaran tertentu yang harus dicapai oleh para pelaksana kebijakan, kinerja kebijakan pada dasarnya merupakan penilaian atas tingginya ketepatan standar dan sasaran tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan informan bahwa, Program Indonesia Pintar yang berbentuk kartu Indonesia Pintar ditujukan untuk siswa yang kurang mampu dan yatim piatu yang kesulitan dalam biaya pendidikan sehingga harus putus sekolah, sesuai dengan pendapat dari Van Meter dan Van Horn dalam Subarsono (2005:3) yang mengatakan bahwa Standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur, sehingga pencapaian tujuan dalam implementasi kebijakan PIP ini dapat tercapai.

Sejalan dengan observasi di lapangan yang dilakukan peneliti untuk menentukan sasaran yang tepat dalam program Indonesia Pintar menggunakan mekanisme yang telah ditetapkan sebagai acuan dalam menentukan sasaran, salah satu contohnya dalam menentukan sasaran siswa yang tidak mampu atau siswa yatim piatu, yang menjadi masalah tidak semua anak yatim piatu merupakan siswa tidak mampu. Akan tetapi pencapaian dari tujuan dari program ini dapat dikatakan berhasil karena beberapa siswa yang mendapatkan bantuan ini merasa terbantu dan meringankan beban orang tua.

Berdasarkan hal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa mekanisme untuk menentukan sasaran, anak miskin dan yatim piatu masih perlu

diperbaiki, sedangkan tujuan dari program ini sudah berhasil dalam membantu persoalan ekonomi siswa yang kurang mampu.

## 2. Sumber Daya

Keberhasilan implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya terpenting dalam menentukan keberhasilan atau implementasi kebijakan. Setiap tahap implementasi menuntut adanya sumber daya yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara apolitik.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan informan bahwa, sumber daya merupakan aspek penting dalam implementasi kebijakan, mulai dari bagaimana melakukan pembagian tugas dalam mensosialisasikan PIP.

Sejalan dengan observasi di lapangan yang dilakukan peneliti sumber daya yang ada dinas pendidikan dan sekolah sudah sangat mendukung programan ini, serta kesiapan para pelaksan dalam melakukan sosialisasi kepada siswa dan orang tua serta proses kerja sama antara wali kelas dan guru BK selaku penanggung jawab dari program ini sangat baik.

Berdasarkan hal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa sumber daya dan kerja sama yang dilakukan sudah baik, pihak sekolah sudah melaksanakan implementasi program ini dengan maksimal, sesuai dengan teori Van Meter dan Van Horn yang sinkron dengan teori Edward III yang dimana

sumber daya merupakan sesuatu hal yang sangat penting dalam mengimplementasikan kebijakan bik sumber daya manusia maupun finansial.

### **3. Komunikasi Antar Organisasi dan Penguatan Aktivitas**

Agar kebijakan publik bisa dilaksanakan dengan efektif, menurut Van Horn dan Van Mater (dalam Widodo 1974) apa yang menjadi standar tujuan harus dipahami oleh para individu (implementors). Yang bertanggung jawab atas pencapaian standar dan tujuan kebijakan, karena itu standar dan tujuan harus dikomunikasikan kepada para pelaksana. Komunikasi dalam kerangka penyampaian informasi kepada para pelaksana kebijakan tentang apa menjadi standar dan tujuan harus konsisten dan seragam (consistency and uniformity) dari berbagai sumber informasi.

Berdasarkan wawancara dengan informan dapat disimpulkan bahwa, indicator sumber daya berkaitan dengan komunikasi dalam memberikan informasi dan pengimputan data agar tidak mengalami kesalahan sehingga informasi dalam pemberian pemahaman mudah di pahami dan di jalankan oleh orang tua siswa/i.

Sejalan dengan observasi di lapangan yang dilakukan peneliti komunikasn dan sumber daya sangat berkaitan selama pengimplementasian program ini komunikasi dari kepala sekolah dan dinas penidikan, arahan dari kepala sekolah, guru BK dan wali kelas yang bekerja sama dengan baik menjadikan informasi tersampaikan dengan baik kepada siswa dan orang tua.

Berdasarkan hal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa komunikasi dan sumber daya sangat berkaitan, semakin baik SDM yang ada maka komunikasi setiap para pelaksana juga baik. Komunikasi setiap para pelaksana harus selalu dilakukan untuk meminimalisir terjadinya kesalahan, sesuai dengan teori Edward III dimana komunikasi memiliki pengaruh terkait keberhasilan suatu kebijakan.

#### **4. Karakteristik Agen Pelaksana**

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat dalam pengimplementasian kebijakan. Hal ini penting karena kinerja implementasi kebijakan akan sangat dipengaruhi oleh ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya. Hal ini berkaitan dengan konteks kebijakan yang akan dilaksanakan pada beberapa kebijakan menuntut pelaksana kebijakan yang ketat dan disiplin. Pada konteks lain diperlukan agen pelaksana yang demokratis dan persuasif. Selain itu, cakupan atau luas wilayah menjadi pertimbangan penting dalam menentukan agen pelaksana kebijakan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan informan bahwa, kebijakan PIP dalam karakteristik agen pelaksana telah menjalankan sesuai dengan SOP dan kategori tekanan berasal dari keluhan wali murid yang tidak dapat mengindahkan himbuan dan/ atau pemberitahuan dari pihak sekolah.\

Sejalan dengan observasi di lapangan yang dilakukan peneliti karakteristik agen pelaksana dan standar dan sasaran kebijakan berkaitan dimana yang menjadi pokok permasalahan mekanisme yang ada seperti

keluhan dari orang tua siswa kurang mampu yang tidak mendapat bantuan program indonesia pintar, akan tetapi SOP yang ada sudah cocok dengan kebijakan ini.

Berdasarkan hal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa dalam indikator karakteristik agen pelaksana SOP yang di berlakukan sudah sesuai dengan kebijakan, hanya saja fregmentasi atau keluhan masih di rasakan pihak sekolah karena beberapa orang tua mengeluh akibat anak mereka tidak mendapatkan bantuan PIP.

#### **5. Disposisi Implementor**

Menurut pendapat Van Metter dan Van Horn dalam Agustinus (2006): "sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana kebijakan sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul permasalahan dan persoalan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan publik biasanya bersifat top down yang sangat mungkin para pengambil keputusan tidak mengetahui bahkan tak mampu menyentuh kebutuhan, keinginan atau permasalahan yang harus diselesaikan".

Berdasarkan hasil wawancara yang di lakukan dengan informan bahwa, para pelaksana dari dinas pendidikan dan sekolah, memahami dan menerima kebijakan program indonesia pintar serta mendukung keberhasilan kebijakan tersebut.

Sejalan dengan observasi di lapangan yang dilakukan peneliti sikap para pelaksana memang memahami apa tujuan dari kebijakan ini sehingga mereka melaksanakan implementasi kebijakan ini dengan maksimal, dengan memberikan informasi kepada siswa dan orang tua.

Berdasarkan hal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa disposisi implementor sudah melaksanakan tugas dalam implementasi kebijakan ini dengan baik karena mereka memahami bagaimana kebijakan ini, dalam memberikan pelayanan dan memberikan informasi sudah sangat baik.

#### **6. Lingkungan social ekonomi dan politik**

sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi sumber masalah dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Karena itu, upaya implementasi kebijakan mensyaratkan kondisi lingkungan eksternal yang kondusif.

Berdasarkan hasil wawancara yang di lakukan dengan informan bahwa lingkungan sosial dan politik berpengaruh penting terhadap keberhasilan kebijakan program indonesia pintar yang dilihat dari dukungan dari orang tua dan staf khusus yang mendorong dan membantu dalam kebijakan program tersebut.

Sejalan dengan observasi di lapangan yang dilakukan peneliti lingkungan sosial dan politik dalam implementasi program indonesia pintar orang tua

mendukung progra tersebut karena bantuan ini mengurangi beban mereka serta satf khusus yang membatu dalam keberhasilan kebijakan tersebut.

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan, lingkungan sosisal ekonomi dan poliik, menjadi salahsatu penunjang menjadikan program indonesia pintar ini bisa mencapai tujuan yang di harapkan.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan dalam bab sebelumnya maka kesimpulannya sebagai berikut:

1. Standar dan Sasaran Kebijakan untuk menentukan sasaran anak miskin dan yatim piatu masih perlu diperbaiki, sedangkan tujuan dari program ini sudah berhasil dalam membantu persoalan ekonomi siswa yang kurang mampu.
2. Sumber Daya dan kerja sama yang dilakukan sudah baik, pihak sekolah sudah melaksanakan implementasi program ini dengan maksimal.
3. Komunikasi Antar Organisasi, komunikasi dan sumber daya sangat berkaitan, semakin baik SDM yang ada maka komunikasi setiap para pelaksana juga baik. Komunikasi setiap para pelaksana harus selalu dilakukan untuk meminimalisir terjadinya kesalahan.
4. Karakteristik Agen Pelaksana, karakteristik agen pelaksana dan standar dan sasaran kebijakan memiliki keterkaitan dimana pokok permasalahan dari kebijakan ini yaitu mekanisme yang tidak sesuai dengan kondisi yang ada seperti siswa kurang mampu atau siswa yatim piatu yang tidak dapat karena tidak memiliki KPS.
5. Disposisi Implementor, disposisi implementor sudah melaksanakan tugas dalam implementasi kebijakan ini dengan baik karena mereka

6. memahami bagaimana kebijakan ini, dalam memberikan pelayanan dan memberikan informasi sudah sangat baik.
7. Lingkungan Sosial Ekonomi dan Politik, lingkungan sosial ekonomi dan politik, menjadi salahsatu penunjang menjadikan program indonesia pintar ini bisa mencapai tujuan yang di harapkan.

#### **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka sebagai bahan masukan untuk Implementasi Kebijakan Program Indonesia Pintar Pada Jenjang Sekolah Menengah Atas Di Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone sebagai berikut:

1. Memperbaiki mekanisme yang ada karena program indonesia pintar ini di tujukan untuk siswa miskin dan yatim piatu tapi ada beberapa siswa yang tidak mendapatkan bantuan tersebut karena mekanisme yang tidak pas.
2. Memberikan pelayanan yang baik terlebih pada pengimputan data siswa agr lebih memerhatikan sehingga dapat meminimalisir kesalahan yang terjadi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andriani, A. S., Abdul Mahsyar, and Ihyani Malik. "Implementasi Kebijakan Kesehatan Masyarakat Dalam Upaya Menurunkan Angka Kematian Ibu Dan Bayi (Studi Kasus Di Kabupaten Bulukumba Dan Takalar)." *JPPM: Journal of Public Policy and Management* 1.1 (2019): 22-28.
- Anugrah, R. (2018). *Implementasi Program Indonesia Pintar Di Kota Bandar Lampung (Studi kasus di SDN 1 Pelita Tanjung Karang Pusat Kec.Enggal)*.
- Destiansy, P. (2017). *Akuntabilitas Penyaluran Dana Program Indonesia Pintar (Pip) Di Smp Negeri 1 Banyuasin Iii Kabupaten Banyuasin Tahun 2017*.
- Dunn, William N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjadara University Press
- Illiya Arina Riska, Dra. Dewi Rostyaningsih, M. S. (2018). *Implementasi Program Indonesia Pintar Pada Jenjang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMP 3 Satu Atap Gebog Kudus*. *Journal of Public Policy and Management Review*.
- Kendi, S. (2016). *Pelaksanaan Kebijakan Publik Program Pintar Ditinjau Dalam Prospektif Ekonomi Politik Di Indonesia*.
- Mussardo, G. (2019). II KAJIAN PUSTAKA Kebijakan Publik. *Statistical Field Theor*, 53(9), 1689–1699. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Of, I., Indonesia, S., Through, P., & Card, S. (2016). *IMPLEMENTASI PROGRAM INDONESIA PINTAR MELALUI IMPLEMENTATION OF SMART INDONESIA PROGRAM THROUGH SMART CARD*. 633–644.
- Rafidah, S. (2016). *Implementasi Kebijakan Kartu Indonesia Pintar Dalam Upaya Pemerataan Pendidikan Tahun Ajaran 2015/2016 Di Smp Negeri 1 Semin*.
- Rohaeni, N. E., & Saryono, O. (2018). *Implementasi Kebijakan Program Indonesia Pintar ( PIP ) Melalui Kartu Indonesia Pintar ( KIP ) dalam Upaya Pemerataan Pendidikan*. 2(1).
- Saraswati, L. N. (2017). *Implementasi Kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) pada Jenjang Sekolah Dasar di Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda*. *EJournal Administrasi Negara*, 5(Nomor 4), 6737–6750.
- Setyawati, S. (2018). *Efektivitas Program Kartu Indonesia Pintar (Kip) Bagi Siswa Smk Di Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap (Studi Permendikbud*

*No. 12 Tahun 2015 Tentang Program Indonesia Pintar). Skripsi lain Purwokerto, 12.*

Suaib, Muhammad Ridha. 2016. *Pengantar Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Calpulis

Tachjan. (2006). *Implementasi Kebijakan Publik*. AIPI.

Tangkilisan, Hesel Nogi S. 2003. *Kebijakan Publik Yang Membumi (Konsep, Strategi, Dan Kasus) Kerjasama Yayasan Pembaharuan Administrasi*

Wahab, Solichin Abdul. 2007. *Analisis Kebijakan*. Jakarta: Bumi Aksara

Wiratadya, K. (2010). *Implementasi Kebijakan Publik Model Van Meter Van Horn: The Policy Implementation Process* (p. <https://kertyawitaradya.wordpress.com/2010/04/13/i>).

Yanti, winda. (2018). *Evaluasi Kebijakan Program Indonesia Pintar Pada Tingkat Sekolah Menengah Atas Di Kecamatan Tanjung Lubuk Kabupaten Ogan Komering Ilir*.

**Artikel :**

BKPSDM.Bone.go.id.<https://www.bkpsdm.bone.go.id/2018/04/16/kecamatan-lamuru/> (diakses tanggal 12 oktober 2020)

Bone.go.id. <https://bone.go.id/category/profil/> (diakses tanggal 12 oktober 2020)

**Dokumen :**

Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 166 Tahun 2014

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003

## LAMPIRAN



Wawancara dengan Tim Manajemen PIP SMA Provinsi Sul-Sel,  
Bapak H. Misi, S.Sos (Makassar, 17 September 2020)



Wawancara dengan Kepala Sekolah SMA Negeri 17 Bone, Bapak  
Muhammad Yunus, S.Pd.,M.Pd. (Bone, 25 September 2020)



Wawancara dengan Guru BK SMA Negeri 17 Bone, Ibu Rosmini,  
S.Pd (Bone, 25 September 2020)



Lokasi Penelitian SMA Negeri 17 Bone (Bone, 25 September 2020)



Wawancara dengan Siswi penerima KIP SMA Negeri 17 Bone,  
Adek Mardewi (Bone, 25 September)



Wawancara dengan Siswi penerima KIP SMA Negeri 17 Bone,  
Adek Rika (Bone, 25 September)

# PENCAIRAN PROGRAM INDONESIA PINTAR (PIP)



Ketentuan melaksanakan pencairan sebagai berikut:

**1**

Siswa penerima ditentukan untuk menerima bantuan yang sudah terdistribusi ke kantor kabupaten, kota, dan provinsi yang telah ada. Untuk kabupaten/kota yang belum ada, maka akan dilakukan pengantar ke kantor kabupaten/kota tersebut dari Direktorat Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah.

**2**

Siswa yang akan ditentukan akan diberikan buku laporan kemajuan belajar dan buku laporan keuangan yang sudah terdistribusi ke kantor kabupaten/kota tersebut. Untuk kabupaten/kota yang belum ada, maka akan dilakukan pengantar ke kantor kabupaten/kota tersebut dari Direktorat Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah.

**3**

Untuk yang Operasional untuk pencairan PIP, Surat pencairan dari Kepala yang tertera di Surat Pencairan PIP Kabupaten/Kota/Kelurahan/Desa yang mendapat pengantar pada saat pencairan. Untuk yang sudah terdistribusi ke kantor kabupaten/kota tersebut, maka akan dilakukan pengantar ke kantor kabupaten/kota tersebut dari Direktorat Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah.

**4**

Untuk yang pencairan melalui rekening bank, maka akan dilakukan pengantar ke kantor kabupaten/kota tersebut. Untuk yang sudah terdistribusi ke kantor kabupaten/kota tersebut, maka akan dilakukan pengantar ke kantor kabupaten/kota tersebut dari Direktorat Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah.

Telp: 0541-373450

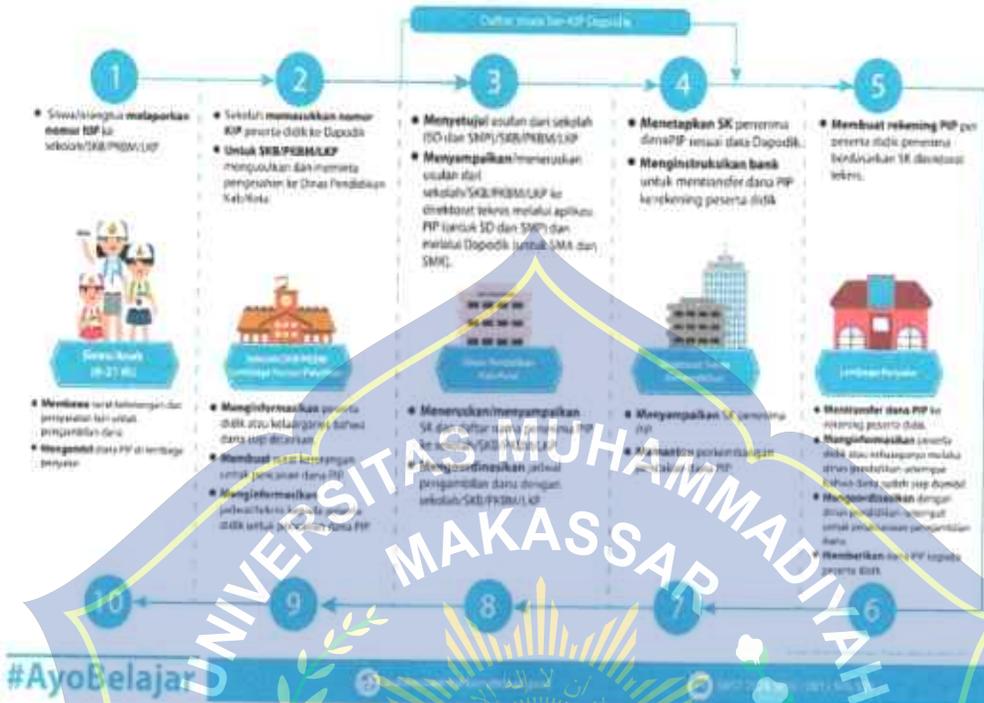
Website: [halikapan.go.id](http://halikapan.go.id)

Website: [ntn.go.id](http://ntn.go.id)

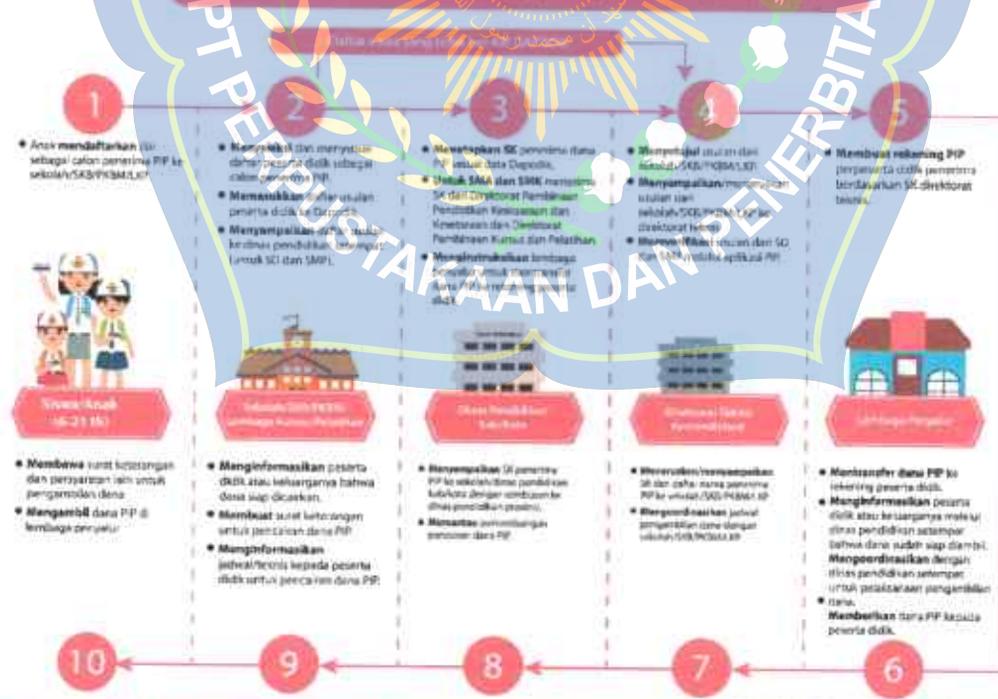


Masa Berlaku:  
2014-2019

## Alur Pemanfaatan PIP bagi yang Memiliki KIP



## Alur Pemanfaatan PIP bagi yang Tidak Memiliki KIP



#AyoBelajar

indonesia@ppl.kemdiknas.go.id

021 724 9700 / 021 724 922



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
 BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

Nomor : 3937/G.01/P/TS/2020  
 Lampiran :  
 Fisikal : Lembar Permisian

Kepada Yth  
 Kepala Dinas Pendidikan Prov. Sulsel

Tuanku

Berdasarkan surat Ketua Panitia Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru FISIP UNISMU Makassar No. 1751/05/G-4-2019/10000 tanggal 20 Juli 2020 perihal sebagai calon mahasiswa/peserta dibawah ini:

<b>Nama</b> Nomor Pokok Program Studi Pekerjaan/Alamat Alamat	<b>NUR AZWA</b> 1011111111 Ilmu Komunikasi Mahasiswa(S1) Jl. Sri Alauddin No. 258 Makassar
---	--

Bermaksud untuk melakukan penelitian di tempat Anda, dengan judul sebagai berikut:

**"IMPLEMENTASI KEMUKAKAN PROGRAM INDOENIA FORTAK PADA BERKANG SEWA, MAMENENG**  
**ATAS DI KECAMATAN LAHURI KANDAPETE BONE"**  
 yang akan diimplementasikan pada 21 Agustus 2020

Selubungan ini disertai dengan surat izin penelitian yang telah terdaftar di Direktorat Kependidikan dan Pengembangan Kebijakan Direktorat Jenderal Pendidikan dan Kebudayaan dan terlampir surat izin penelitian.

Demiikian Saya sebagai Kepala Bidang Perizinan dan Pengawasan sebagai bentuk permohonan.

Dibuat dan di Makassar  
 Pada tanggal : 22 Juli 2020

**A. GUBERNUR SULAWESI SELATAN**  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU**  
**SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN**  
 Sirkur Administrasi Polrijonon Perizinan

**DIJAYADI HAS, S.Sos., M.Si**  
 Pangkat : Pembina Tk. I  
 No. : 3811501.700001.004

Terselasa via  
 1. Ketua Panitia Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru FISIP UNISMU Makassar di Makassar;  
 2. Hokigra

SMKP FISIP 2018.020



Jl. Bougainville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936  
 Website : [www.unismu.ac.id](http://www.unismu.ac.id) Email : [info@unismu.ac.id](mailto:info@unismu.ac.id)  
 Makassar 90221





PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN  
DINAS PENDIDIKAN  
SMA NEGERI 17 BONE  
Jalan Poros Makassar - Jorong KM 129 Pal. Lalebata Kec. Lamuru Kab. Bone 92164  
Email: sma17bone@yahoo.co.id

**SURAT KETERANGAN MELAKSANAKAN PENELITIAN**

Nomor: 420/101-SMA.17/BONE/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala SMA Negeri 17 Bone menerangkan dengan sebenarnya bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : NUR LIZAH  
NIM : 105611121816  
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Berdasarkan Surat Izin Penelitian dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 3937/S.01/PTSP/2020 tanggal 20 Juli 2020, telah melaksanakan kegiatan Penelitian di SMA Negeri 17 Bone pada tanggal 21 s.d. 25 September 2020 dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul:

**"IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM INDONESIA PINTAR PADA IF SIANG SEKOLAH MENENGAH ATAS DI KECAMATAN LAMURU KABUPATEN BONE"**

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lamuru, 25 September 2020

Kepala Sekolah,

Muhammad Yunus, S.Pd., M.Pd.  
NIP. 19700730 199412 1 003

Tembusan Yth.:

1. Kepala Dinas Pendidikan Prov. Sulsel di Makassar
2. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wil. III di Wampona
3. Ketua Prodi Ilmu Administrasi Negara Unismuh Makassar di Makassar
4. Arsip

## RIWAYAT HIDUP



Nur Azizah, lahir pada tanggal 23 April 1998 tepatnya di Bontang, dan sekarang sudah menetap di Dusun Langkana Desa Mattampa Walie Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan. Anak ketiga dari 4 bersaudara dari buah kasih pasangan bapak Rustam dan Ibu Suriani. Penulis mulai menempuh pendidikan di Sekolah Dasar pada tahun 2005 di SDN 160 Mattmpa Walie, dan tamat pada tahun 2010. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang menengah pertama di SMPN 1 Lamuru dan tamat pada tahun 2013. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang menengah atas di SMAN 1 Lamuru dan sekarang berubah menjadi SMAN 17 Bone dan tamat pada tahun 2016.

Kemudian pada tahun 2016 atas kehendak-Nya penulis bisa melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi, yaitu pada Universitas Muhammadiyah Makassar di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan memilih program studi Ilmu Administrasi Negara dan diakhir studinya menyusun skripsi dengan judul *Implementasi Program Indonesia Pintar pada Jenjang Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 17 Bone Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone.*